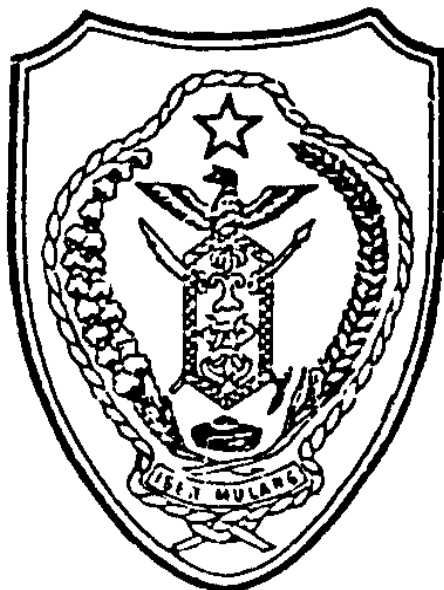


RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-PD) TAHUN 2025

**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Jl. Yos Soedarso No. 02 Palangka Raya 73112
Telp. (0536) 3221703, 3239196, 3221456 Fax. (0536)3222652, 3221884
Email : disnakertrans@kalteng.go.id
Website : www.disnakertrans.kalteng.go.id



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 188.44/256/2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025, maka perlu ditetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 90);

24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 102);
25. Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025.
- KEDUA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - c. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - d. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah;
 - f. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah;
 - g. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - h. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah;
 - i. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah;
 - j. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - k. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - l. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah;
 - m. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - n. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - o. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - p. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - q. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah;

- r. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah;
- s. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah;
- t. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah;
- u. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah;
- v. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah;
- w. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;
- x. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah;
- y. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah;
- z. Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah;
- aa. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah;
- bb. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah;
- cc. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah;
- dd. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah;
- ee. Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah;
- ff. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah;
- gg. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- hh. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah;
- ii. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus;
- jj. Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei;
- kk. Rumah Sakit Umum Daerah Hanau;
- ll. Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
- mm. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
- nn. Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
- oo. Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
- pp. Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
- qq. Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
- rr. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
- ss. Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Setda Kalimantan Tengah;
- tt. Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Tengah; dan
- uu. Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah.

- KETIGA : Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 yang telah ditetapkan, menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 18 Juli 2024

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri:
Up. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah:
Up. a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
b. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan;
c. Asisten Administrasi Umum; dan
d. Kepala Biro Hukum.
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah; dan
5. Masing-masing Kepala Perangkat Daerah untuk diketahui.

KATA PENGANTAR

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah diamanatkan bahwa SKPD wajib menyusun Renja SKPD yang merupakan dokumen perencanaan tahunan SKPD.

Sebagai implementasi Peraturan-peraturan tersebut, maka disusunlah Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah. Dimana Renja ini disusun sebagai acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Kalimantan Tengah Tahun 2025.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 ini, disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas sumbangan pikiran dan tenaga. Semoga Renja Tahun 2025 ini dapat bermanfaat dalam pelaksanaan tugas ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Kalimantan Tengah.

Palangka Raya, Juli 2024

KEPALA DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	3
BAB II Evaluasi Pelaksanaan RENJA-PD Tahun 2023	4
2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA PD Tahun 2023.....	4
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD	16
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	20
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	21
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .	33
BAB III Tujuan dan Sasaran PD	46
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	46
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD	48
3.3. Program dan Kegiatan	50
BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan PD	54
BAB V Penutup	64
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, penyusunan forum PD/lintas PD, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. PD menyusun rancangan awal Renja PD dengan berpedoman pada Renstra PD, hasil evaluasi hasil Renja PD tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja PD tahun berjalan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah PD untuk menyusun Renja PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah disusun berdasarkan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah, Renstra Disnakertrans Provinsi Kalimantan Tengah, serta berpedoman pada Renja Kementerian Ketenagakerjaan RI dan Renja Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi RI

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Ketransmigrasian ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah ;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah adalah untuk memberikan arah/acuan bagi sasaran yang ingin dicapai selama satu tahun kedepan dalam pelaksanaan program/kegiatan dibidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian serta memberikan arah kebijakan pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian sehingga anggaran yang digunakan dapat memberikan manfaat yang tepat bagi pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya pencari kerja dan masyarakat transmigrasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Hasil Evaluasi Renja – PD Tahun 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD 2023 dan Capaian Renstra PD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

BAB III Tujuan dan Sasaran

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

➔ Memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja;
2. Kelompok Sasaran;
3. Lokasi Kegiatan;
4. Kebutuhan Dana Indikatif;
5. Sumber Dana

BAB V Penutup

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023

Evaluasi pelaksanaan Renja PD merupakan telaah terhadap hasil evaluasi pencapaian target kinerja program/kegiatan. Program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja PD, setelah selesai pelaksanaan dilakukan evaluasi/*review* agar pelaksanaan tahun mendatang dapat diidentifikasi realisasi program/kegiatan yang memenuhi atau melampaui target dan yang tidak memenuhi target serta kendala-kendala yang dihadapi.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2023 melaksanakan 2 Urusan, 9 Program, 19 Kegiatan, dan 54 Sub Kegiatan.

URUSAN TENAGA KERJA

- A Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**
- I Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
 - 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 3 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - 4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 5 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- II Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
 - 6 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 7 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 8 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 9 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - 10 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- III Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**
 - 11 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - 12 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- IV Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
 - 13 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 14 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- V Administrasi Umum Perangkat Daerah**
 - 15 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 16 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 17 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 18 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 19 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

- 20 Fasilitas Kunjungan Tamu
- 21 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 22 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- VI Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
- 23 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 24 Pengadaan Mebel
- 25 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- VII Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- 26 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 27 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 28 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- VIII Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- 29 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 30 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 31 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 32 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- B Program Perencanaan Tenaga Kerja**
- IX Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**
- 33 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
- 34 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro
- C Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja**
- X Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi**
- 35 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
- 36 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja
- XI Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah**
- 37 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah
- D Program Penempatan Tenaga Kerja**
- XII Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota**
- 38 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
- 39 Perluasan Kesempatan Kerja
- XII Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**
- 40 Job Fair/Bursa Kerja
- XIV Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**
- 41 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- E Program Hubungan Industrial**
- XV Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota**
- 42 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

- XVI Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi**
 - 43 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi
 - 44 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi
 - 45 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi
- XVII Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)**
 - 46 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)
- F Program Pengawasan Ketenagakerjaan**
- XVIII Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan**
 - 47 Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan
 - 48 Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan
 - 49 Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan

URUSAN TRANSMIGRASI

- G Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi**
- XIX Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi**
 - 50 Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi
 - 51 Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan
- H Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi**
- XX Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**
 - 52 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
- I Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi**
- XXI Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan**
 - 53 Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman
 - 54 Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman

Sampai dengan bulan Desember 2023 capaian realisasi keuangan dan fisik yaitu dari pagu dana sebesar Rp30.829.022.393, realisasi keuangan sebesar Rp24.871.298.347 (80,67%) dan realisasi fisik sebesar 91,32%.

Adapun rincian realisasi kegiatan DPA-SKPD Tahun 2023 sampai dengan akhir Desember 2023 dapat dilaporkan sebagai berikut:

No.	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)		Realisasi		
		Sebelum	Setelah	Rp	%	Fisik (%)
1	2	3	4	5	6	7
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	20.439.649.192	19.824.481.598	17.780.250.254	89,69	100,00
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	415.000.000	415.000.000	358.055.271	86,28	100,00
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	250.000.000	250.000.000	227.023.021	90,81	100,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	30.000.000	30.000.000	25.034.250	83,45	100,00
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	30.000.000	30.000.000	20.184.500	67,28	100,00
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	45.000.000	45.000.000	29.556.500	65,68	100,00
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.000.000	60.000.000	56.257.000	93,76	100,00
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.608.097.361	15.056.403.773	13.294.565.809	88,30	100,00
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.278.097.361	14.726.403.773	13.004.754.309	88,31	100,00
7	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	300.000.000	300.000.000	261.119.500	87,04	100,00
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100,00	100,00
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10.000.000	10.000.000	8.692.000	86,92	100,00
10	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100,00	100,00
III	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	60.000.000	60.000.000	54.415.344	90,69	100,00
11	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	10.000.000	10.000.000	4.430.344	44,30	100,00
12	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	50.000.000	50.000.000	49.985.000	99,97	100,00
IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	275.000.000	287.500.000	263.656.035	91,71	100,00
13	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	250.000.000	250.000.000	229.493.000	91,80	100,00
14	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25.000.000	37.500.000	34.163.035	91,10	100,00
V	Administrasi Umum Perangkat Daerah	695.000.000	613.364.465	600.531.462	97,91	100,00
15	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000	13.864.465	13.863.500	99,99	100,00
16	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.000.000	35.000.000	34.999.200	100,00	100,00
17	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25.000.000	22.000.000	21.999.500	100,00	100,00
18	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000.000	30.000.000	30.000.000	100,00	100,00
19	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000	15.000.000	14.342.000	95,61	100,00
20	Fasilitasi Kunjungan Tamu	75.000.000	60.000.000	59.990.000	99,98	100,00
21	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250.000.000	187.500.000	187.019.130	99,74	100,00
22	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	250.000.000	250.000.000	238.318.132	95,33	100,00
VI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	919.625.000	919.625.000	860.371.300	93,56	100,00
23	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	527.000.000	527.000.000	476.112.000	90,34	100,00
24	Pengadaan Mebel	62.000.000	62.000.000	58.928.800	95,05	100,00
25	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	330.625.000	330.625.000	325.330.500	98,40	100,00

No.	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)		Realisasi		
		Sebelum	Setelah	Rp	%	Fisik (%)
1	2	3	4	5	6	7
VII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.464.198.392	1.469.859.921	1.358.771.436	92,44	100,00
26	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.000.000	20.000.000	19.925.000	99,63	100,00
27	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	478.885.592	524.547.121	523.159.336	99,74	100,00
28	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	965.312.800	925.312.800	815.687.100	88,15	100,00
VIII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.002.728.439	1.002.728.439	989.883.597	98,72	100,00
29	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.000.000	100.000.000	99.825.447	99,83	100,00
30	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	70.000.000	70.000.000	69.982.500	99,98	100,00
31	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	375.000.000	375.000.000	371.206.760	98,99	100,00
32	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	457.728.439	457.728.439	448.868.890	98,06	100,00
B	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	370.000.000	370.000.000	352.472.556	95,26	100,00
IX	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	370.000.000	370.000.000	352.472.556	95,26	100,00
33	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	250.000.000	250.000.000	234.175.081	93,67	100,00
34	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	120.000.000	120.000.000	118.297.475	98,58	100,00
C	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	7.493.671.800	7.084.540.795	3.486.218.557	49,21	62,22
X	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	7.393.671.800	6.984.540.795	3.419.722.057	48,96	61,67
35	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	6.833.671.800	6.424.540.795	2.873.966.597	44,73	58,33
36	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	560.000.000	560.000.000	545.755.460	97,46	100,00
XI	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	100.000.000	100.000.000	66.496.500	66,50	100,00
37	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	100.000.000	100.000.000	66.496.500	66,50	100,00
D	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	800.000.000	650.000.000	582.906.841	89,68	100,00
XII	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	450.000.000	300.000.000	274.047.300	91,35	100,00
38	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	300.000.000	150.000.000	146.393.500	97,60	100,00
39	Perluasan Kesempatan Kerja	150.000.000	150.000.000	127.653.800	85,10	100,00
XII	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	200.000.000	200.000.000	197.751.123	98,88	100,00
40	Job Fair/Bursa Kerja	200.000.000	200.000.000	197.751.123	98,88	100,00
XIV	Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	150.000.000	150.000.000	111.108.418	74,07	100,00
41	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	150.000.000	150.000.000	111.108.418	74,07	100,00
E	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	700.000.000	600.000.000	547.474.987	91,25	100,00
XV	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	120.000.000	95.000.000	86.987.500	91,57	100,00

No.	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)		Realisasi		
		Sebelum	Setelah	Rp	%	Fisik (%)
1	2	3	4	5	6	7
42	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	120.000.000	95.000.000	86.987.500	91,57	100,00
XVI	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	380.000.000	330.000.000	298.327.126	90,40	100,00
43	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	69.874.000	69.874.000	59.924.500	85,76	100,00
44	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	215.126.000	190.126.000	174.375.626	91,72	100,00
45	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	95.000.000	70.000.000	64.027.000	91,47	100,00
XVII	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	200.000.000	175.000.000	162.160.361	92,66	100,00
46	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	200.000.000	175.000.000	162.160.361	92,66	100,00
F	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	1.100.000.000	1.000.000.000	987.684.050	98,77	100,00
XVIII	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	1.100.000.000	1.000.000.000	987.684.050	98,77	100,00
47	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	500.000.000	450.000.000	444.909.900	98,87	100,00
48	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	100.000.000	100.000.000	94.241.368	94,24	100,00
49	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	500.000.000	450.000.000	448.532.782	99,67	100,00
G	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	500.000.000	425.000.000	312.608.450	73,55	100,00
XIX	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	500.000.000	425.000.000	312.608.450	73,55	100,00
50	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	250.000.000	225.000.000	182.877.550	81,28	100,00
51	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	250.000.000	200.000.000	129.730.900	64,87	100,00
H	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	250.000.000	225.000.000	197.164.100	87,63	100,00
XX	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	250.000.000	225.000.000	197.164.100	87,63	100,00
52	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	250.000.000	225.000.000	197.164.100	87,63	100,00
I	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	750.000.000	650.000.000	624.518.552	96,08	100,00
XXI	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	750.000.000	650.000.000	624.518.552	96,08	100,00
53	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	275.000.000	275.000.000	252.168.859	91,70	100,00

No.	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)		Realisasi		
		Sebelum	Setelah	Rp	%	Fisik (%)
1	2	3	4	5	6	7
54	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	475.000.000	375.000.000	372.349.693	99,29	100,00
	JUMLAH	32.403.320.992	30.829.022.393	24.871.298.347	80,67	91,32

Sedangkan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2023 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada tabel 2.1. sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2023 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD/RENSTRA)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu/Tahun 2022 (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan/ Tahun 2023 (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun berjalan)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun RKPD Tahun 2023 (%)		
1	2	4	5	6			7			8			13			14 = 7 +13			15 = 14 / 6 x100%		
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Ketenagakerjaan	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																			
		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Indeks Perencanaan Tenaga Kerja	9,80	Angka Indeks	2.560.000.000	8,86	Angka Indeks	55.619.573	9,60	Angka Indeks	370.000.000	9,53	Angka Indeks	624.190.528	8,86	Angka Indeks	679.810.101	90,41		26,56
		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Terlaksananya penyusunan rencana tenaga kerja	5,00	Pkt	2.560.000.000	1,00	Pkt	55.619.573	1,00	Pkt	370.000.000	1,00	Pkt	624.190.528	2,00	Pkt	679.810.101	40,00		26,56
		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro				1,00	Dok	55.619.573	1,00	Dok	250.000.000	1,00	Dok	280.518.103	2,00	Dok	336.137.676	-		-
		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang Mengikuti Pelatihan Penyusunan RTK Mikro							28,00	Org	120.000.000	28,00	Org	343.672.425	28,00	Org	343.672.425	-		-
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Indeks Penduduk dan Tenaga Kerja	8,00	Angka Indeks	5.355.000.000	7,11	Angka Indeks	45.000.000	7,77	Angka Indeks	300.000.000	7,22	Angka Indeks	180.891.912	7,11	Angka Indeks	225.891.912	88,88		4,22
		Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Terlaksananya pelatihan tenaga kerja				1,00	Thn	45.000.000	1,00	Thn	300.000.000	1,00	Thn	180.891.912	2,00	Thn	225.891.912	-		-
		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n				10,00	Org	45.000.000	30,00	Org	300.000.000	30,00	Org	180.891.912	40,00	Org	225.891.912	-		-
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Indeks Pelatihan dan Kompetensi Kerja	12,62	Angka Indeks	12.750.000.000	5,32	Angka Indeks	856.360.000	12,06	Angka Indeks	6.684.540.795	6,91	Angka Indeks	3.926.084.394	5,32	Angka Indeks	4.782.444.394	42,16		37,51

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2023 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD/RENSTRA)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu/Tahun 2022 (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan/ Tahun 2023 (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun berjalan)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun RKPD Tahun 2023 (%)		
1	2	4	5	6			7			8			13			14 = 7 +13			15 = 14 / 6 x100%		
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp
		Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Terlaksananya pelatihan tenaga kerja	5,00	Thn	12.750.000.000	1,00	Thn	856.360.000	1,00	Thn	6.684.540.795	1,00	Thn	3.926.084.394	2,00	Thn	4.782.444.394	40,00		37,51
		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n				60,00	Org	856.360.000	980,00	Org	6.124.540.795	530,00	Org	3.021.488.934	590,00	Org	3.877.848.934	-		-
		Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja							5,00	Unit	560.000.000	5,00	Unit	904.595.460	5,00	Unit	904.595.460	-		-
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Indeks Produktifitas Tenaga Kerja	6,61	Angka Indeks	7.650.000.000	4,57	Angka Indeks	49.900.000	6,29	Angka Indeks	100.000.000	7,13	Angka Indeks	123.795.500	4,57	Angka Indeks	173.695.500	69,14		2,27
		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	Terlaksananya konsultansi produktivitas pada perusahaan	5,00	Thn	7.650.000.000				1,00	Thn	100.000.000	1,00	Thn		1,00	Thn	0	20,00		0,00
		Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas							20,00	Prshn	100.000.000	20,00	Prshn		20,00	Prshn	0	-		-
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Indeks Kesempatan Kerja	13,55	Angka Indeks	2.682.603.000	10,89	Angka Indeks	35.000.000	13,32	Angka Indeks	800.000.000	12,20	Angka Indeks	1.184.942.401	10,89	Angka Indeks	1.219.942.401	80,37		45,48
		Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelayanan antar kerja	5,00	Thn	800.000.000				1,00	Thn	450.000.000	1,00	Thn	575.646.200	1,00	Thn	575.646.200	20,00		71,96
		Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan							1.500,00	Org	300.000.000	#####	Org	146.393.500	1.500,00	Org	146.393.500	-		-
		Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja							50,00	Org	150.000.000	50,00	Org	429.252.700	50,00	Org	429.252.700	-		-
		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Tersedianya data informasi pasar kerja	5,00	Thn	800.000.000				1,00	Thn	200.000.000	1,00	Thn	424.905.323	1,00	Thn	424.905.323	20,00		53,11
		Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja							100,00	Org	200.000.000	100,00	Org	424.905.323	100,00	Org	424.905.323	-		-

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2023 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD/RENSTRA)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu/Tahun 2022 (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan/ Tahun 2023 (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun berjalan)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun RKPD Tahun 2023 (%)		
1	2	4	5	6			7			8			13			14 = 7 +13			15 = 14 / 6 x100%		
				K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp	
		Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah RPTKA yang disahkan	50,00	RPTKA	1.082.603.000	10,00	RPTKA	35.000.000	20,00	RPTKA	150.000.000	20,00	RPTKA	184.390.878	30,00	RPTKA	219.390.878	60,00		20,27
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah TKA yang telah Mendapatkan Pengesahan RPTKA				80,00	Org	35.000.000	100,00	Org	150.000.000	100,00	Org	184.390.878	180,00	Org	219.390.878	-		-
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Indeks Hubungan Industrial	4,82	Angka Indeks	3.070.250.000	4,48	Angka Indeks	48.976.000	4,24	Angka Indeks	95.000.000	4,25	Angka Indeks	86.987.500	4,48	Angka Indeks	135.963.500	92,95		4,43
		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	Tersedianya data hubungan industrial	5,00	Thn	3.070.250.000	1,00	Thn	48.976.000	1,00	Thn	95.000.000	1,00	Thn	86.987.500	2,00	Thn	135.963.500	40,00		4,43
		Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek				10,00	Lap	48.976.000	20,00	Lap	95.000.000	20,00	Lap	86.987.500	30,00	Lap	135.963.500	-		-
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Indeks Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja	9,64	Angka Indeks	2.270.250.000	7,83	Angka Indeks	36.965.000	9,52	Angka Indeks	200.000.000	8,81	Angka Indeks	162.160.361	7,83	Angka Indeks	199.125.361	81,22		8,77
		Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	UMP ditetapkan	5,00	Pkt	2.270.250.000	1,00	Pkt	36.965.000	1,00	Pkt	200.000.000	1,00	Pkt	162.160.361	2,00	Pkt	199.125.361	40,00		8,77
		Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah Penetapan UMP				1,00	SK	36.965.000	1,00	SK	200.000.000	1,00	SK	162.160.361	2,00	SK	199.125.361	-		-
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Indeks Jaminan Sosial Tenaga Kerja	10,00	Angka Indeks	3.679.175.000	10,00	Angka Indeks	122.042.000	10,00	Angka Indeks	380.000.000	10,00	Angka Indeks	675.886.726	10,00	Angka Indeks	797.928.726	#####		21,69

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2023 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD/RENSTRA)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu/Tahun 2022 (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan/ Tahun 2023 (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun berjalan)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun RKPD Tahun 2023 (%)		
1	2	4	5	6			7			8			13			14 = 7 +13			15 = 14 / 6 x100%		
				K	Pkt	Rp	K	Pkt	Rp	K	Pkt	Rp	K	Pkt	Rp	K	Pkt	Rp	K		Rp
		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis di perusahaan	15,00	Pkt	3.679.175.000	3,00	Pkt	122.042.000	3,00	Pkt	380.000.000	3,00	Pkt	675.886.726	6,00	Pkt	797.928.726	40,00		21,69
		Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perselisihan yang Dicegah				5,00	Perkara	27.280.000	10,00	Perkara	69.874.000	10,00	Perkara	174.074.500	15,00	Perkara	201.354.500	-		-
		Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselamatkan				3,00	Perkara	44.792.000	10,00	Perkara	215.126.000	10,00	Perkara	363.593.226	13,00	Perkara	408.385.226	-		-
		Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi				5,00	Asosiasi	49.970.000	364,00	Asosiasi	95.000.000	364,00	Asosiasi	138.219.000	369,00	Asosiasi	188.189.000	-		-
		PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Indeks Kondisi Lingkungan Kerja	7,47	Angka Indeks	2.554.175.000	6,78	Angka Indeks	239.419.000	7,20	Angka Indeks	1.100.000.000	6,88	Angka Indeks	1.996.057.832	6,78	Angka Indeks	2.235.476.832	90,76		87,52
		Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Terlaksananya pengawasan ketenagakerjaan	15,00	Pkt	2.554.175.000	3,00	Pkt	239.419.000	3,00	Paket	1.100.000.000	3,00	Paket	1.996.057.832	6,00	Paket	2.235.476.832	40,00		87,52
		Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)				10,00	Prshn	139.979.000	60,00	Prshn	500.000.000	60,00	Prshn	937.027.500	70,00	Prshn	1.077.006.500	-		-
		Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan				10,00	Kasus	49.628.000	10,00	Kasus	100.000.000	10,00	Kasus	155.275.368	20,00	Kasus	204.903.368	-		-

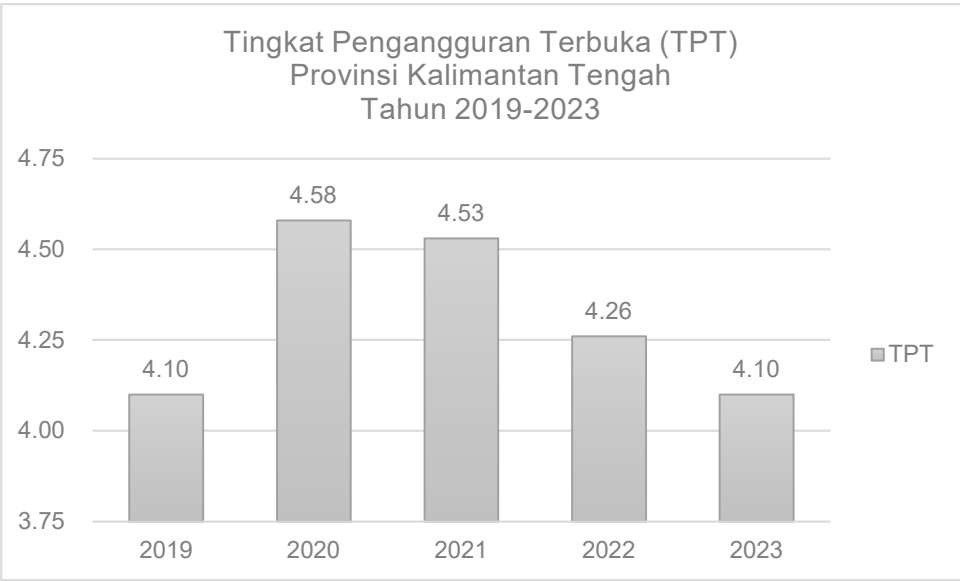
No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2023 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD/RENSTRA)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu/Tahun 2022 (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan/ Tahun 2023 (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun berjalan)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun RKPD Tahun 2023 (%)		
1	2	4	5	6			7			8			13			14 = 7 +13			15 = 14 / 6 x100%		
				K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp	
		Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3				10,00	Prshn	49.812.000	60,00	Prshn	500.000.000	108,00	Prshn	903.754.964	118,00	Prshn	953.566.964	-		-
2	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Potensial dan Industri Kreatif Dengan Mendorong Masuknya Investasi Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																			
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI																			
		PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah Usulan kawasan transmigrasi yang direkomendasikan (kawasan)	11,00	Kawasa n	2.409.770.000	6,00	Kawasan	99.471.500	8,00	Kawasan	500.000.000	6,00	Kawasan	607.530.250	6,00	Kawasan	707.001.750	54,55		29,34
		Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Tersedianya lahan transmigrasi yang clear and clean	10,00	Pkt	2.409.770.000	2,00	Pkt	99.471.500	2,00	Pkt	500.000.000	0,00	Pkt	607.530.250	2,00	Pkt	707.001.750	20,00		29,34
		Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjakamkan dengan Daerah Lain				1,00	Dok	49.955.500	1,00	Dok	250.000.000	0,00	Dok	346.658.550	1,00	Dok	396.614.050	-		-
		Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi				1,00	Kawasan	49.516.000	1,00	Kawasan	250.000.000	0,00	Kawasan	260.871.700	1,00	Kawasan	310.387.700	-		-
		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah Satuan permukiman baru atau pemenuhan daya tampung (SP)	6,00	SP	2.411.972.500	1,00	SP	79.001.855	1,00	SP	250.000.000	1,00	SP	333.587.500	1,00	SP	412.589.355	16,67		17,11
		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya penataan persebaran transmigran	5,00	Pkt	2.411.972.500	1,00	Pkt	79.001.855	1,00	Pkt	250.000.000	1,00	Pkt	333.587.500	2,00	Pkt	412.589.355	40,00		17,11
		Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah				1,00	Lap	79.001.855	1,00	Lap	250.000.000	1,00	Lap	333.587.500	2,00	Lap	412.589.355	-		-

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2023 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD/RENSTRA)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu/Tahun 2022 (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan/ Tahun 2023 (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun berjalan)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun RKPD Tahun 2023 (%)		
1	2	4	5	6			7			8			13			14 = 7 +13			15 = 14 / 6 x100%		
				K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp	
			Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi																		
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah Satuan Permukiman transmigrasi dalam pembinaan (SP)	1,00	SP	2.487.567.500	2,00	SP	208.952.791	2,00	Kawasan	750.000.000	2,00	Kawasan	1.055.045.125	2,00	Kawasan	1.263.997.916	#####		50,81
		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	Terlaksananya pembinaan transmigrasi	10,00	Pkt	2.487.567.500	2,00	Pkt	208.952.791	2,00	Pkt	750.000.000	2,00	Pkt	1.055.045.125	4,00	Pkt	1.263.997.916	40,00		50,81
		Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang dibina				421,00	Kepala Keluarga	99.795.000	271,00	Kepala Keluarga	275.000.000	271,00	Kepala Keluarga	289.613.239	692,00	Kepala Keluarga	389.408.239	-		-
		Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan				1,00	Satuan Permukiman	109.157.791	2,00	Satuan Permukiman	475.000.000	2,00	Satuan Permukiman	765.431.886	3,00	Satuan Permukiman	874.589.677	-		-

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Salah satu masalah utama ketenagakerjaan adalah tingginya angka pengangguran. Dimana angka pengangguran ini digambarkan melalui Tingkat Penganggur Terbuka (TPT) yang merupakan rasio jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja. Salah satu tujuan pembangunan ketenagakerjaan adalah menurunkan tingkat pengangguran terbuka ini.

Di Provinsi Kalimantan Tengah, Tingkat Pengangguran Terbuka selama lima tahun terakhir (*Y-on-Y* bulan Agustus) bisa dilihat dalam grafik berikut:



Pada grafik di atas, terlihat TPT pada tahun 2020 sebesar 4,58 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya sebesar 4,10. Hal ini terjadi akibat adanya pandemi *Covid-19* yang mempengaruhi semua sektor secara global dan dampaknya masih terasa hingga tahun 2021, dengan TPT sebesar 4,53 karena pandemi masih belum berakhir. Pada tahun 2022, dikarenakan kondisi semakin membaik membuat TPT kembali turun menjadi 4,26 dan berlanjut hingga tahun 2023 menjadi sebesar 4,10.

Pada urusan ketrasmigrasian, sampai dengan tahun 2023 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas untuk melaksanakan Pemberdayaan/Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi pada Kimtrans Bina sebanyak 271 KK.

Analisis kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan indikator kinerja utama yang sudah ditentukan dalam Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026. Analisis Kinerja Pelayanan dapat digambarkan pada tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian	Catatan Analisis
				Tahun 2023 (n-2)	Tahun 2024 (n-1)	Tahun 2025 (n)	Tahun 2026 (n+1)	Tahun 2023 (n-2)	
1	Indeks Perencanaan Tenaga Kerja			9,60	9,70	9,75	9,80	9,53	
2	Indeks Penduduk dan Tenaga Kerja			7,77	7,88	7,99	8,00	7,22	
3	Indeks Kesempatan Kerja			13,32	13,43	13,50	13,55	12,20	
4	Indeks Pelatihan dan Kompetensi Kerja			12,06	12,38	12,50	12,62	6,91	
5	Indeks Produktivitas Tenaga Kerja			6,29	6,40	6,55	6,61	7,13	
6	Indeks Hubungan Industrial			4,24	4,35	4,70	4,82	4,25	
7	Indeks Kondisi Lingkungan Kerja			7,20	7,30	7,41	7,47	6,88	
8	Indeks Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja			9,52	9,56	9,60	9,64	8,81	
9	Indeks Jaminan Sosial Tenaga Kerja			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian	Catatan Analisis
				Tahun 2023 (n-2)	Tahun 2024 (n-1)	Tahun 2025 (n)	Tahun 2026 (n+1)	Tahun 2023 (n-2)	
10	Jumlah Satuan permukiman baru atau pemenuhan daya tampung (SP)			1	1	1	1	1	
11	Jumlah Satuan Permukiman transmigrasi dalam pembinaan (SP)			2	2	1	1	2	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Kondisi ketenagakerjaan yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah masih cukup tingginya angka pengangguran terbuka yang disebabkan terbatasnya lapangan kerja yang tersedia baik formal maupun informal, disamping itu pembukaan lapangan kerja baru di sektor swasta (perusahaan perkebunan) belum mampu menyerap tenaga kerja lokal, rendahnya kualitas SDM Pencari kerja sehingga belum mampu terserap di pasar kerja lokal maupun nasional.

Salah satu cara untuk menangani pengangguran adalah dengan bekerja sama dengan pihak-pihak lain untuk pelatihan, penempatan dan pemagangan tenaga kerja. Selain itu juga dengan menambah pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan anggaran dari APBD, APBN maupun sumber lain. Untuk itu pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK) harus menjadi perhatian khusus.

Dibidang Ketranasmigrasian permasalahan utama yang sering dihadapi adalah lahan usaha yang kurang subur (marginal) karena rendahnya pH tanah, tidak tersedianya pasar untuk pemasaran hasil-hasil pertanian daerah transmigrasi, disamping permasalahan utama diatas, permasalahan lain yang dihadapi minimnya tingkat pendidikan peserta transmigrasi, kondisi sarana dan prasarana permukiman yang kurang memadai sehingga dapat menghambat aksesibilitas dari dan keluar lokasi transmigrasi, Hal ini disebabkan belum optimalnya dukungan sektor terkait untuk pengembangan wilayah transmigrasi.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD di masa datang. Isu-isu strategis yang menjadi tantangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah adalah :

- a. Rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja;
- b. Peluang kerja yang makin terbuka dengan adanya proyek *food estate* di Kalimantan Tengah
- c. Kurangnya perlindungan tenaga kerja baik sektor formal maupun informal.
- d. Makin terbatasnya lokasi daerah tujuan transmigrasi yang memenuhi kriteria kelayakan program 2 C (*Clear and Clean*) dan 3L (Layak Usaha, Layak Berkembang dan Layak Lingkungan).

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam rancangan awal Renja PD dianggarkan pagu sebesar Rp34.158.459.835,00 (Tiga Puluh Empat Milyar Seratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) yang terdiri dari 9 Program, 21 Kegiatan, dan 57 Sub Kegiatan yang diusulkan melalui **Rancangan Awal Renja PD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025**. Berdasarkan hasil analisa kebutuhan, terdapat penambahan anggaran dan jumlah Sub Kegiatan, sehingga pagu anggaran menjadi Rp36.369.178.236,00 (Tiga Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) dengan jumlah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan menjadi dari 9 Program, 21 Kegiatan, dan 61 Sub Kegiatan yang tertuang dalam **Renja PD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025**.

Adapun rincian review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini :

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal (RKPD) Tahun 2025
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase Keterlaksanaan	100 Persen	23.708.459.835	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase Keterlaksanaan	100 Persen	25.194.178.236
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersedianya data perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	12 Bulan	555.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersedianya data perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	12 Bulan	570.000.000
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Palangka Raya	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	300.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Palangka Raya	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	300.000.000
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Palangka Raya	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	30.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Palangka Raya	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	35.000.000
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Palangka Raya	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	30.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Palangka Raya	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	35.000.000
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Palangka Raya	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	45.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Palangka Raya	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	50.000.000
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Palangka Raya	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	150.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Palangka Raya	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	150.000.000
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terkelolanya administrasi keuangan	12 Bulan	17.516.643.325	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terkelolanya administrasi keuangan	12 Bulan	17.516.643.325

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Palangka Raya	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	150 Orang	17.186.643.325	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Palangka Raya	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	150 Orang	17.186.643.325
7	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Palangka Raya	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	300.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Palangka Raya	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	275.000.000
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Palangka Raya	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Palangka Raya	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10.000.000
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Palangka Raya	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Palangka Raya	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	10.000.000
10	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Palangka Raya	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Laporan	10.000.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Palangka Raya	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Laporan	10.000.000
III	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Terkelolanya administrasi barang milik daerah	12 Bulan	75.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Terkelolanya administrasi barang milik daerah	12 Bulan	90.000.000
11	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Palangka Raya	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	15.000.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Palangka Raya	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	15.000.000
12	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Palangka Raya	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	60.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Palangka Raya	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	75.000.000
IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	12 Bulan	335.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	12 Bulan	475.000.000

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Palangka Raya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	3 Paket	250.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Palangka Raya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	3 Paket	250.000.000
14	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Palangka Raya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	0	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Palangka Raya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen	30.000.000
15	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Palangka Raya	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	0	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Palangka Raya	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	10.000.000
16	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Palangka Raya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	85.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Palangka Raya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	85.000.000
17	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Palangka Raya	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Palangka Raya	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	150 Orang	60.000.000
18	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Palangka Raya	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Palangka Raya	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang	40.000.000
V	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terkelolanya administrasi umum	12 Bulan	885.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terkelolanya administrasi umum	12 Bulan	985.000.000
19	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Palangka Raya	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Palangka Raya	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000
20	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Palangka Raya	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	100.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Palangka Raya	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	100.000.000
21	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Palangka Raya	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	25.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Palangka Raya	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	25.000.000

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Palangka Raya	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	30.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Palangka Raya	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	30.000.000
23	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Palangka Raya	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3.000 Dokumen	15.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Palangka Raya	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3.000 Dokumen	15.000.000
24	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Palangka Raya	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	100.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Palangka Raya	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	100.000.000
25	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kalimantan Tengah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	400.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kalimantan Tengah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	500.000.000
26	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Palangka Raya	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	200.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Palangka Raya	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	200.000.000
VI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terlaksananya pengadaan barang milik daerah	12 Bulan	1.245.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terlaksananya pengadaan barang milik daerah	12 Bulan	1.335.000.000
27	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Palangka Raya	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	495.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Palangka Raya	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	570.000.000
28	Pengadaan Mebel	Palangka Raya	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	150.000.000	Pengadaan Mebel	Palangka Raya	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	165.000.000
29	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Palangka Raya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit	600.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Palangka Raya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit	600.000.000
VII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya jasa penunjang disnakertrans	12 Bulan	1.746.816.510	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya jasa penunjang disnakertrans	12 Bulan	1.846.816.510

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Palangka Raya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	20.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Palangka Raya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	20.000.000
31	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Palangka Raya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	514.966.763	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Palangka Raya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	514.966.763
32	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Palangka Raya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.211.849.747	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Palangka Raya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.311.849.747
VIII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya barang milik daerah	12 Bulan	1.350.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya barang milik daerah	12 Bulan	2.400.000.000
33	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Palangka Raya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	150.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Palangka Raya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	150.000.000
34	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Palangka Raya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	100.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Palangka Raya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	100.000.000
35	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Palangka Raya	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	100.000.000	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Palangka Raya	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	100.000.000
36	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Palangka Raya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	500.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Palangka Raya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.300.000.000
37	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Palangka Raya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	500.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Palangka Raya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	750.000.000

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
B	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA		Indeks Perencanaan Tenaga Kerja	10 Angka Indeks	550.000.000	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA		Indeks Perencanaan Tenaga Kerja	10 Angka Indeks	625.000.000
IX	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		Terlaksananya penyusunan rencana tenaga kerja	1 Paket	550.000.000	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		Terlaksananya penyusunan rencana tenaga kerja	1 Paket	625.000.000
38	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	300.000.000	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	350.000.000
39	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Kalimantan Tengah	Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang Mengikuti Pelatihan Penyusunan RTK Mikro	28 Orang	250.000.000	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Kalimantan Tengah	Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang Mengikuti Pelatihan Penyusunan RTK Mikro	28 Orang	275.000.000
C	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Indeks Pelatihan dan Kompetensi Kerja Indeks Penduduk dan Tenaga Kerja Indeks Produktivitas Tenaga Kerja	12,38 Angka Indeks 7,88 Angka Indeks 6,40 Angka Indeks	2.750.000.000	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Indeks Pelatihan dan Kompetensi Kerja Indeks Penduduk dan Tenaga Kerja Indeks Produktivitas Tenaga Kerja	12,38 Angka Indeks 7,88 Angka Indeks 6,40 Angka Indeks	3.000.000.000
X	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		Terlaksananya pelatihan tenaga kerja	1 Tahun	2.500.000.000	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		Terlaksananya pelatihan tenaga kerja	1 Tahun	2.750.000.000
40	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kalimantan Tengah	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	250 Orang	2.000.000.000	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kalimantan Tengah	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	250 Orang	2.250.000.000
41	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Kalimantan Tengah	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	1 Unit	500.000.000	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Kalimantan Tengah	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	1 Unit	500.000.000
XI	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah		Terlaksananya konsultasi produktivitas pada perusahaan	1 Tahun	250.000.000	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah		Terlaksananya konsultasi produktivitas pada perusahaan	1 Tahun	250.000.000
42	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	Kalimantan Tengah	Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	20 Perusahaan	250.000.000	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	Kalimantan Tengah	Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	20 Perusahaan	250.000.000

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
D	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		Indeks Kesempatan Kerja	13 Angka Indeks	1.500.000.000	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		Indeks Kesempatan Kerja	13 Angka Indeks	1.650.000.000
XII	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya pelayanan antar kerja	1 Tahun	1.050.000.000	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya pelayanan antar kerja	1 Tahun	1.150.000.000
43	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Kalimantan Tengah	Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	1.000 Orang	300.000.000	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Kalimantan Tengah	Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	1.000 Orang	300.000.000
44	Perluasan Kesempatan Kerja	Kalimantan Tengah	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	75 Orang	600.000.000	Perluasan Kesempatan Kerja	Kalimantan Tengah	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	75 Orang	700.000.000
45	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Kalimantan Tengah	Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitas layanan ULD	20 Orang	150.000.000	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Kalimantan Tengah	Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitas layanan ULD	20 Orang	150.000.000
XIII	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Tersedianya data informasi pasar kerja	1 Tahun	200.000.000	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Tersedianya data informasi pasar kerja	1 Tahun	250.000.000
46	Job Fair/Bursa Kerja		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	100 Orang	200.000.000	Job Fair/Bursa Kerja		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	100 Orang	250.000.000
XIV	Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah RPTKA yang disahkan	20 RPTKA	250.000.000	Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah RPTKA yang disahkan	20 RPTKA	250.000.000
47	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kalimantan Tengah	Jumlah TKA yang telah Mendapatkan Pengesahan RPTKA	100 Orang	250.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kalimantan Tengah	Jumlah TKA yang telah Mendapatkan Pengesahan RPTKA	100 Orang	250.000.000

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
E	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		Indeks Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indeks Hubungan Industrial Indeks Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja	10,00 Angka 4,35 Indeks 9,56 Angka Indeks Angka Indeks	1.500.000.000	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		Indeks Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indeks Hubungan Industrial Indeks Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja	10,00 Angka 4,35 Indeks 9,56 Angka Indeks Angka Indeks	1.500.000.000
XV	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota		Tersedianya data hubungan industrial	1 Tahun	250.000.000	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota		Tersedianya data hubungan industrial	1 Tahun	250.000.000
48	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Kalimantan Tengah	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek	20 Laporan	250.000.000	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Kalimantan Tengah	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek	20 Laporan	250.000.000
XVI	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi		Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis di perusahaan	3 Paket	750.000.000	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi		Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis di perusahaan	3 Paket	750.000.000
49	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Kalimantan Tengah	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	10 Perkara	250.000.000	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Kalimantan Tengah	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	10 Perkara	250.000.000

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Kalimantan Tengah	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	10 Perkara	250.000.000	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Kalimantan Tengah	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	10 Perkara	250.000.000
51	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Kalimantan Tengah	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	364 Asosiasi	250.000.000	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Kalimantan Tengah	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	364 Asosiasi	250.000.000
XVII	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektor Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota (UMSK)		UMP ditetapkan	1 Paket	500.000.000	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektor Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota (UMSK)		UMP ditetapkan	1 Paket	500.000.000
52	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Kalimantan Tengah	Jumlah Penetapan UMP	1 Surat Keputusan	250.000.000	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Kalimantan Tengah	Jumlah Penetapan UMP	1 Surat Keputusan	250.000.000
53	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kalimantan Tengah	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	526.190 Orang	250.000.000	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kalimantan Tengah	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	526.190 Orang	250.000.000
F	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN		Indeks Kondisi Lingkungan Kerja	7 Angka Indeks	1.700.000.000	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN		Indeks Kondisi Lingkungan Kerja	7 Angka Indeks	1.700.000.000
XVIII	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan		Terlaksananya pengawasan ketenagakerjaan	3 Paket	1.700.000.000	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan		Terlaksananya pengawasan ketenagakerjaan	3 Paket	1.700.000.000
54	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Kalimantan Tengah	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	60 Perusahaan	700.000.000	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Kalimantan Tengah	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk	60 Perusahaan	700.000.000

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)		
55	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Kalimantan Tengah	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	10 Kasus	300.000.000	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Kalimantan Tengah	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	10 Kasus	300.000.000
56	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Kalimantan Tengah	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	60 Perusahaan	700.000.000	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Kalimantan Tengah	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	60 Perusahaan	700.000.000
G	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI		Jumlah Usulan Kawasan Transmigrasi yang direkomendasi	9 Kawasan Transmigrasi	800.000.000	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI		Jumlah Usulan Kawasan Transmigrasi yang direkomendasi	9 Kawasan Transmigrasi	900.000.000
XIX	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi		Tersedianya lahan transmigrasi yang <i>clear and clean</i>	2 Paket	800.000.000	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi		Tersedianya lahan transmigrasi yang <i>clear and clean</i>	2 Paket	900.000.000
57	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain	1 Dokumen	400.000.000	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain	1 Dokumen	450.000.000
58	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Kalimantan Tengah	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi	1 Kawasan Transmigrasi	400.000.000	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Kalimantan Tengah	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi	1 Kawasan Transmigrasi	450.000.000
H	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI		Jumlah Satuan permukiman baru atau pemenuhan daya tampung	1 SP	425.000.000	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI		Jumlah Satuan permukiman baru atau pemenuhan daya tampung	1 SP	450.000.000
XX	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Terlaksananya penataan persebaran transmigran	1 Paket	425.000.000	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Terlaksananya penataan persebaran transmigran	1 Paket	450.000.000

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Kalimantan Tengah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	425.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Kalimantan Tengah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	450.000.000
I	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI		Jumlah Satuan Permukiman transmigrasi dalam pembinaan	2 SP	1.225.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI		Jumlah Satuan Permukiman transmigrasi dalam pembinaan	2 SP	1.350.000.000
XXI	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan		Terlaksananya pembinaan transmigrasi	2 Paket	1.225.000.000	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan		Terlaksananya pembinaan transmigrasi	2 Paket	1.350.000.000
60	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman	Kalimantan Tengah	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang dibina	271 Kepala Keluarga	400.000.000	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman	Kalimantan Tengah	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang dibina	271 Kepala Keluarga	500.000.000
61	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman	Kalimantan Tengah	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	2 Satuan Permukiman	825.000.000	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman	Kalimantan Tengah	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	2 Satuan Permukiman	850.000.000
	JUMLAH				34.158.459.835	JUMLAH				36.369.178.236

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam Forum Gabungan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 yang merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota, ada beberapa Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengajukan usulan program kegiatan tahun 2025 kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah.

Berdasarkan analisa terhadap usulan-usulan tersebut, beberapa dinyatakan selaras dengan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021-2026. Adapun kegiatan-kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut ini :

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah

USULAN KABUPATEN/KOTA								
NO.	TGL	KAB/KOTA	PERMASALAHAN	USULAN	STATUS	SUB KEGIATAN	VOL/SATUAN	CATATAN
1	19-02-2024	SERUYAN	Pelatihan Membatik (Rp. 75.000.000,-)	Menurunnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Diproses	2.07.04.1.01.0005 Perluasan Kesempatan Kerja	20 Orang	Usulan dapat diakomodir jika Disnakertrans Prov. Kalteng mendapatkan anggaran DBH-DR. Jenis pelatihan dan lokus akan dikaji kemudian. Besar anggaran menyesuaikan.
2	19-02-2024	SERUYAN	Pelatihan Pakan Ikan (Rp. 80.000.000,-)	Menurunnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Diproses	2.07.04.1.01.0005 Perluasan Kesempatan Kerja	20 Orang	Usulan dapat diakomodir jika Disnakertrans Prov. Kalteng mendapatkan anggaran DBH-DR. Jenis pelatihan dan lokus akan dikaji kemudian. Besar anggaran menyesuaikan.
3	19-02-2024	SERUYAN	Pelatihan Anyaman daun purun (Rp. 75.000.000,-)	Menurunnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Diproses	2.07.04.1.01.0005 Perluasan Kesempatan Kerja	20 Orang	Usulan dapat diakomodir jika Disnakertrans Prov. Kalteng mendapatkan anggaran DBH-DR. Jenis pelatihan dan lokus akan dikaji kemudian. Besar anggaran menyesuaikan.
4	19-02-2024	SERUYAN	Pelatihan Otomotif (Rp. 175.000.000,-)	Menurunnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Diproses	2.07.03.1.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	1 Paket	Berbasis kompetensi dan tersedia sarana dan prasarana pelatihan, serta instruktur. Anggaran menyesuaikan.
5	19-02-2024	SERUYAN	Pelatihan Pembinaan LPKS (Rp. 75.000.000,-)	Menurunnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Ditolak			Berdasar UU 23/2014 bukan kewenangan Provinsi, melainkan Kab/Kota
6	14-03-2024	MURUNG RAYA	Untuk mengurangi tingkat pengangguran maka diperlukan pembukaan lapangan pekerjaan. untuk memudahkan dalam mendapatkan pekerjaan maka dipandang perlu untuk melakukan terhadap masyarakat dalam meningkatkan skill	Meningkatnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kalimantan Tengah	Diproses	2.07.03.1.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	2 Paket	5 dari 6 jurusan yang diusulkan berbasis kompetensi dan tersedia sarana dan prasarana pelatihan, serta instruktur. Namun tidak semua dapat diakomodir. Anggaran menyesuaikan. Sementara: alat berat 150jt; tata rias/otomotif/las/listrik 70jt

USULAN KABUPATEN/KOTA								
NO.	TGL	KAB/KOTA	PERMASALAHAN	USULAN	STATUS	SUB KEGIATAN	VOL/SATUAN	CATATAN
7	14-03-2024	BARITO SELATAN	diperlukan nya kegiatan seperti Memperingati Hari Buruh (sosialisasi / diskusi / seminar/ acara seni / bakti sosial / pelatihan / kopetensi olahraga / upacara penghargaan)	Meningkatnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kalimantan Tengah	Ditolak			Tidak ada kewenangan dan kegiatan dimaksud berdasar UU 23/2014
8	14-03-2024	BARITO SELATAN	diperlukan nya kegiatan Kampanye Keselamatan Kerja	Menurunnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Ditolak			Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan dilaksanakan Provinsi ke seluruh kabupaten/kota
9	14-03-2024	BARITO SELATAN	kurangnya Pelatihan K3 pekerja di kabupaten barito selatan	Menurunnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Ditolak			Pelatihan K3 dilaksanakan oleh Perusahaan Jasa K3 (PJK3)
10	14-03-2024	BARITO SELATAN	diperlukan nya Sosialisasi UMK untuk meningkatkan Tingkat Partisipasi Angka Kerja masyarakat kabupaten barito selatan	Menurunnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Diproses	2.07.05.1.03.0001 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	1 Paket	Usulan Mengenai Sosialisasi UMK, Peraturan Pengupahan, dan Bimtek Susu, dijadikan 1 menjadi Kebijakan Pengupahan. Anggaran menyesuaikan.
11	14-03-2024	BARITO SELATAN	diperlukannya Bimtek Struktur dan Skala Upah untuk masyarakat kabupaten barito selatan	Menurunnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Diproses			Usulan Mengenai Sosialisasi UMK, Peraturan Pengupahan, dan Bimtek Susu, dijadikan 1 menjadi Kebijakan Pengupahan. Anggaran menyesuaikan.
12	14-03-2024	SUKAMARA	Untuk Mengurangi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Sukamara, Diperlukan Kegiatan Pelatihan Tata Rias (Make Up Artist Comercial/MUA). (1 Kegiatan)	Meningkatnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kalimantan Tengah	Diproses	2.07.03.1.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	1 Paket	Berbasis kompetensi dan tersedia sarana dan prasarana pelatihan, serta instruktur. Anggaran menyesuaikan.
13	14-03-2024	BARITO SELATAN	Diperlukannya Sosialisasi PP 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan	Menurunnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Diproses			Usulan Mengenai Sosialisasi UMK, Peraturan Pengupahan, dan Bimtek Susu, dijadikan 1 menjadi Kebijakan Pengupahan. Anggaran menyesuaikan.

USULAN KABUPATEN/KOTA								
NO.	TGL	KAB/KOTA	PERMASALAHAN	USULAN	STATUS	SUB KEGIATAN	VOL/SATUAN	CATATAN
14	14-03-2024	BARITO SELATAN	Diperlukannya pelatihan untuk Pembangunan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kalimantan Tengah	Diproses	2.07.03.1.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	2 Paket	7 dari 9 jurusan yang diusulkan berbasis kompetensi dan tersedia sarana dan prasarana pelatihan, serta instruktur. Anggaran menyesuaikan. Sementara: otomotif/las/listrik/processing/komputer/menjahit @60jt
15	14-03-2024	SUKAMARA	Belum tersedianya Fasum yang layak pakai dalam menunjang pelayanan masyarakat Transmigrasi, Diperlukan Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial (Rehab Masjid UPT SP.1 Pulau Nibung (Aset Disnakertrans Provinsi))	Kepemilikan lahan yang tumpang tindih dengan lahan perkebunan swasta	Ditolak			Belum menjadi prioritas Disnakertrans Prov. Kalteng tahun 2025. Rekomendasi: Usulan diajukan ke Pusat (APBN)
16	14-03-2024	SUKAMARA	Dalam upaya peningkatan kemampuan dan produktivitas warga transmigrasi, Diperlukan Pelatihan Olahan Pangan Lokal dan Pengemasannya bagi warga UPT SP.1 Pulau Nibung. (1 Kegiatan)	Kepemilikan lahan yang tumpang tindih dengan lahan perkebunan swasta	Diproses	3.32.04.1.01.0001 Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	1 Paket	Pelatihan pada Kawasan Transmigrasi sebagai Upaya Peningkatan Kapasitas SDM. Anggaran menyesuaikan.
17	14-03-2024	SUKAMARA	Agar Terjalin upaya silaturahmi warga bersama Transmigran dalam mensukseskan Program Transmigrasi, Diperlukan Kegiatan Dalam rangka hari bhakti Transmigrasi. (1 Kegiatan)	Kepemilikan lahan yang tumpang tindih dengan lahan perkebunan swasta	Ditolak			Berdasar UU 23/2014 bukan kewenangan Provinsi
18	14-03-2024	SUKAMARA	Belum adanya Bengkel Nelayan di Kel. Jelai (1 Paket)	Belum optimalnya dukungan SDM dan infrastruktur sarana dan prasarana	Dikembalikan			Di luar urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Ajukan kembali ke dinas lain.
19	14-03-2024	SUKAMARA	Belu adanya Bangsal Perbaikan Jaring di Desa Sungai Tabuk (1 Paket)	Belum optimalnya dukungan SDM dan	Dikembalikan			Di luar urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Ajukan kembali ke dinas lain.

USULAN KABUPATEN/KOTA								
NO.	TGL	KAB/KOTA	PERMASALAHAN	USULAN	STATUS	SUB KEGIATAN	VOL/SATUAN	CATATAN
				infrastruktur sarana dan prasarana				
20	14-03-2024	SUKAMARA	Belum adanya Bangsal Perbaikan Jaring di Desa Sungai Cabang Barat (2 Paket)	Belum optimalnya dukungan SDM dan infrastruktur sarana dan prasarana	Dikembalikan			Di luar urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Ajukan kembali ke dinas lain.
21	14-03-2024	SUKAMARA	Belum adanya Bangsal Perbaikan Jaring di Desa Sungai Damar (1 Paket)	Belum optimalnya dukungan SDM dan infrastruktur sarana dan prasarana	Dikembalikan			Di luar urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Ajukan kembali ke dinas lain.
22	10/3/2024	KOTAWARINGI N TIMUR	Kurangnya kesadaran Perusahaan untuk pembuatan Peraturan Perusahaan dan perjanjian kerja bersama Rp. Rp. 26.500.000,-	Masih rendahnya jumlah tenaga kerja yang terlindungi Hak-haknya	Diproses	2.07.05.1.01.0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	1 Paket	Usulan terkait HI dijadikan 1 kegiatan menjadi Sosialisasi Sarana HI dan Pengupahan
23	10/3/2024	KOTAWARINGI N TIMUR	Kurangnya sosialisasi pencegahan perselisihan hubungan industrial di perusahaan Rp. 30.000.000,-	Masih rendahnya jumlah tenaga kerja yang terlindungi Hak-haknya	Diproses			Usulan terkait HI dijadikan 1 kegiatan menjadi Sosialisasi Sarana HI dan Pengupahan
24	10/3/2024	KOTAWARINGI N TIMUR	Kurangnya Sosialisasi UMK di perusahaan dan kurangnya perusahaan yang belum melaksanakan Upah Minimum Kabupaten Rp. 50.000.000,-	Masih rendahnya jumlah tenaga kerja yang terlindungi Hak-haknya	Diproses			Usulan terkait HI dijadikan 1 kegiatan menjadi Sosialisasi Sarana HI dan Pengupahan
25	10/3/2024	KOTAWARINGI N TIMUR	Rendahnya Pembekalan Pendidikan Bagi Tenaga kerja Mandiri dalam wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur. Rp. 200.000.000,-	Masih Rendahnya Tenaga Kerja yang diberdayakan dan ditempatkan	Diproses	2.07.04.1.01.0005 Perluasan Kesempatan Kerja	20 orang	Anggaran menyesuaikan.

USULAN KABUPATEN/KOTA								
NO.	TGL	KAB/KOTA	PERMASALAHAN	USULAN	STATUS	SUB KEGIATAN	VOL/SATUAN	CATATAN
26	10/3/2024	KOTAWARINGI N TIMUR	Terbatasnya pelatihan teknisi sepeda motor RP. 75.000.000	Masih Rendahnya Kompetensi Tenaga Kerja	Diproses	2.07.03.1.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	1 Paket	Berbasis kompetensi dan tersedia sarana dan prasarana pelatihan, serta instruktur. Anggaran menyesuaikan.
27	10/3/2024	KOTAWARINGI N TIMUR	Kurangnya pemahaman peserta pemagangan terhadap aturanyang ada dimitra magang Rp. 100.000.000,-	Masih Rendahnya Kompetensi Tenaga Kerja	Ditolak			Dalam UU 23/2014 dan Kepmendagri 1317/2023 tidak ada kewenangan maupun sub kegiatan terkait pemagangan bagi Daerah. Disarankan diajukan melalui APBN.
28	10/3/2024	KOTAWARINGI N TIMUR	Kurangnya Mitra Kerja yang bekerja sama dalam Kegiatan Pemagangan Rp. 100.000.000,-	Masih Rendahnya Kompetensi Tenaga Kerja	Ditolak			Dalam UU 23/2014 dan Kepmendagri 1317/2023 tidak ada kewenangan maupun sub kegiatan terkait pemagangan bagi Daerah. Disarankan diajukan melalui APBN.
29	10/3/2024	KOTAWARINGI N TIMUR	Belum ada dana untuk kegiatan pemagangan luar negeri Rp. 150.000.000,-	Masih Rendahnya Kompetensi Tenaga Kerja	Ditolak			Dalam UU 23/2014 dan Kepmendagri 1317/2023 tidak ada kewenangan maupun sub kegiatan terkait pemagangan bagi Daerah. Disarankan diajukan melalui APBN.
30	14-03-2024	PULANG PISAU	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berbasis Kompetensi. Dengan alokasi Anggaran Rp. 250.000.000,-	Masih Rendahnya Kompetensi Tenaga Kerja	Dikembalikan			Usulan tdak jelas (minimal ada kejuruan pelatihan yang diusulkan)
31	14-03-2024	KAPUAS	Belum optimalnya pelaksanaan pelatihan Desain Grafis berbasis Kompetensi untuk Pencari Kerja. Pelatihan Desain Grafis. 1 paket	Menurunnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Diproses	2.07.03.1.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	1 Paket	Berbasis kompetensi dan tersedia sarana dan prasarana pelatihan, serta instruktur. Anggaran menyesuaikan.
32	14-03-2024	KAPUAS	Belum optimalnya pelaksanaan pelatihan Menjahit berbasis Kompetensi untuk Pencari Kerja. Pelatihan Menjahit . 1 Paket	Menurunnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Diproses	2.07.03.1.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	1 Paket	Berbasis kompetensi dan tersedia sarana dan prasarana pelatihan, serta instruktur. Anggaran menyesuaikan.

USULAN KABUPATEN/KOTA								
NO.	TGL	KAB/KOTA	PERMASALAHAN	USULAN	STATUS	SUB KEGIATAN	VOL/SATUAN	CATATAN
33	14-03-2024	KAPUAS	Tidak tersedianya anggaran Pelatihan berbasis non kompetensi dan padat karya untuk pencari kerja yang ingin berwirausaha. Penyebarluasan Penempatan Tenaga Kerja melalui Pelatihan Padat Karya. 1 Paket	Menurunnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Diproses	2.07.04.1.01.0005 Perluasan Kesempatan Kerja	20 Orang	Anggaran menyesuaikan.
34	14-03-2024	KAPUAS	Tidak tersedianya anggaran untuk pelaksanaan job fair. Job Fair/Bursa Kerja di Kabupaten Kapuas	Menurunnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Diproses	2.07.04.1.03.0003 Job Fair/Bursa Kerja		Berdasar UU 23/2014 kewenangan Provinsi job fair tingkat Provinsi, kewenangan Kab/Kota job fair tingkat Kab/Kota. Lokus kegiatan akan dikaji dahulu
35	14-03-2024	KAPUAS	Belum optimalnya pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja. Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja di Kabupaten Kapuas. 200 orang	Menurunnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Ditolak			Berdasar UU 23/2014 kewenangan Provinsi PBJ tingkat Provinsi, kewenangan Kab/Kota PBJ tingkat Kab/Kota.
36	14-03-2024	KAPUAS	Belum adanya pembinaan operasional penempatan AKAD dan AKL bagi pemberi kerja dan BKK. Pembinaan Operasional Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL bagi BKK dan Pemberi Kerja di Kabupaten Kapuas. 50 orang	Menurunnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Ditolak			Tidak ada dalam Renstra dan Renja Disnakertrans Prov. Kalteng

USULAN KABUPATEN/KOTA								
NO.	TGL	KAB/KOTA	PERMASALAHAN	USULAN	STATUS	SUB KEGIATAN	VOL/SATUAN	CATATAN
37	15-03-2024	GUNUNG MAS	Pelatihan Tata Rias (Rias Pengantin)	Meningkatnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kalimantan Tengah	Diproses	2.07.03.1.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	1 Paket	Berbasis kompetensi dan tersedia sarana dan prasarana pelatihan, serta instruktur. Kabupaten tidak memiliki BLK, agar mencari tempat yang sesuai (LPK swasta, kab. terdekat). Anggaran menyesuaikan.
38	15-03-2024	GUNUNG MAS	Pelatihan Pangkas Rambut	Meningkatnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kalimantan Tengah	Ditolak			Keterbatasan sarana dan prasarana pelatihan, serta instruktur
39	15-03-2024	GUNUNG MAS	Pelatihan Hairdo (Tata Rias Rambut)	Meningkatnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kalimantan Tengah	Ditolak			Keterbatasan sarana dan prasarana pelatihan, serta instruktur
40	15-03-2024	GUNUNG MAS	Pelatihan Menjahit	Meningkatnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kalimantan Tengah	Diproses	2.07.03.1.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	1 Paket	Berbasis kompetensi dan tersedia sarana dan prasarana pelatihan, serta instruktur. Kabupaten tidak memiliki BLK, agar mencari tempat yang sesuai (LPK swasta, kab. terdekat). Anggaran menyesuaikan.
41	15-03-2024	GUNUNG MAS	Pelatihan Pertukangan	Meningkatnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kalimantan Tengah	Ditolak			Keterbatasan sarana dan prasarana pelatihan, serta instruktur
42	15-03-2024	GUNUNG MAS	Pelatihan Komputer	Menurunnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Diproses	2.07.03.1.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	1 Paket	Berbasis kompetensi dan tersedia sarana dan prasarana pelatihan, serta instruktur. Kabupaten tidak memiliki BLK, agar mencari tempat yang sesuai (LPK swasta, kab. terdekat). Anggaran menyesuaikan.
43	15-03-2024	BARITO TIMUR	Pelatihan Operator Alat Berat (Excavator) (30 Orang Rp. 180.000.000)	Masih Rendahnya Kompetensi Tenaga Kerja	Diproses	2.07.03.1.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	1 Paket	Berbasis kompetensi. Anggaran menyesuaikan.
44	15-03-2024	BARITO TIMUR	Pelatihan Driver (Dump truck, Mobil Sarana dan Vessel) (30 orang Rp. 200.000.000)	Masih Rendahnya Kompetensi Tenaga Kerja	Ditolak			Keterbatasan sarana dan prasarana pelatihan, serta instruktur

USULAN KABUPATEN/KOTA								
NO.	TGL	KAB/KOTA	PERMASALAHAN	USULAN	STATUS	SUB KEGIATAN	VOL/SATUAN	CATATAN
45	15-03-2024	BARITO TIMUR	Pemagangan Peserta Pelatihan (60 orang Rp. 200.000.000)	Masih Rendahnya Kompetensi Tenaga Kerja	Ditolak			Dalam UU 23/2014 dan Kepmendagri 1317/2023 tidak ada kewenangan maupun sub kegiatan terkait pemagangan bagi Daerah. Disarankan diajukan melalui APBN.
46	15-03-2024	BARITO TIMUR	Bimbingan Teknis Penyusunan Struktur Skala Upah (50 orang (3 hari) Rp. 125.000.000)	Masih rendahnya jumlah tenaga kerja yang terlindungi Hak-haknya	Diproses	2.07.05.1.03.0001 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	1 Paket	Anggaran menyesuaikan.
47	15-03-2024	BARITO TIMUR	Sosialisasi Teknik Negosiasi Penyelesaian Hubungan Industrial (50 orang (3 hari) Rp. 125.000.000)	Masih rendahnya jumlah tenaga kerja yang terlindungi Hak-haknya	Diproses	2.07.05.1.02.0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Paket	Anggaran menyesuaikan.
48	15-03-2024	KOTAWARINGI N BARAT	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran di lahan calon transmigrasi	Kepemilikan lahan yang tumpang tindih dengan lahan perkebunan swasta	Diproses	3.32.02.1.01.0001 Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	1 paket	Usulan Pelepasan Kawasan Hutran untuk Calon Lokasi Transmigrasi Rangka seluas 325 Ha. Agar kabupaten menyiapkan data pendukung untuk pengusulan Pelepasan Kawasan Hutan
49	15-03-2024	KOTAWARINGI N BARAT	Pelaksanaan Canvasing, Job Fair dan Bazaar, serta Sosialisasi ke Perusahaan	Meningkatnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kalimantan Tengah	Diproses	2.07.04.1.03.0003 Job Fair/Bursa Kerja		Berdasar UU 23/2014 kewenangan Provinsi job fair tingkat Provinsi, kewenangan Kab/Kota job fair tingkat Kab/Kota. Lokus kegiatan akan dikaji dahulu
50	18-03-2024	PALANGKA RAYA	Menurunnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Perencanaan Tenaga Kerja	Menurunnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Ditolak			Kewenangan Provinsi menyusun RTKD Provinsi, kewenangan Kab/Kota menyusun RTKD Kab/Kota masing-masing.

USULAN KABUPATEN/KOTA								
NO.	TGL	KAB/KOTA	PERMASALAHAN	USULAN	STATUS	SUB KEGIATAN	VOL/SATUAN	CATATAN
51	21-03-2024	SUKAMARA	Belum tersedianya Fasum yang layak pakai dalam menunjang pelayanan masyarakat Transmigrasi, Diperlukan Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial (Rehab Gudang UPT (Aset Disnakertrans Provinsi))	Kepemilikan lahan yang tumpang tindih dengan lahan perkebunan swasta	Ditolak			Belum menjadi prioritas Disnakertrans Prov. Kalteng tahun 2025. Rekomendasi: Usulan diajukan ke Pusat (APBN)
52	21-03-2024	SUKAMARA	Belum tersedianya Fasum yang layak pakai dalam menunjang pelayanan masyarakat Transmigrasi, Diperlukan Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial (Rehab Kantor UPT)	Kepemilikan lahan yang tumpang tindih dengan lahan perkebunan swasta	Ditolak			Belum menjadi prioritas Disnakertrans Prov. Kalteng tahun 2025. Rekomendasi: Usulan diajukan ke Pusat (APBN)
53	21-03-2024	SUKAMARA	Belum tersedianya Fasum yang layak pakai dalam menunjang pelayanan masyarakat Transmigrasi, Diperlukan Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial (Rehab Rumah Kepala UPT)	Kepemilikan lahan yang tumpang tindih dengan lahan perkebunan swasta	Ditolak			Belum menjadi prioritas Disnakertrans Prov. Kalteng tahun 2025. Rekomendasi: Usulan diajukan ke Pusat (APBN)
54	5/4/2024	BARITO TIMUR	Pelatihan Operator Alat Berat (Excavator) (30 orang, Rp. 180.000.000)	Masih Rendahnya Kompetensi Tenaga Kerja	Ditolak			Double usulan dengan usulan sebelumnya. Usulan sebelumnya diproses, namun akan dikaji lagi terlebih dahulu dan anggaran menyesuaikan
55	5/4/2024	BARITO TIMUR	Pelatihan Driver (Dump truck, Mobil Sarana dan Vessel) (30 orang, Rp. 200.000.000)	Masih Rendahnya Kompetensi Tenaga Kerja	Ditolak			Double usulan dengan usulan sebelumnya. Usulan sebelumnya ditolak karena keterbatasan sarana dan prasarana pelatihan, serta instruktur

USULAN KABUPATEN/KOTA								
NO.	TGL	KAB/KOTA	PERMASALAHAN	USULAN	STATUS	SUB KEGIATAN	VOL/SATUAN	CATATAN
56	5/4/2024	BARITO TIMUR	Pemagangan Peserta Pelatihan (60 orang, Rp. 200.000.000)	Masih Rendahnya Tenaga Kerja yang diberdayakan dan ditempatkan	Ditolak			Double usulan dengan usulan sebelumnya. Usulan sebelumnya ditolak karena dalam UU 23/2014 dan Kepmendagri 1317/2023 tidak ada kewenangan maupun sub kegiatan terkait pemagangan bagi Daerah. Disarankan diajukan melalui APBN.
57	5/4/2024	BARITO TIMUR	Bimbingan Teknis Penyusunan Struktur Skala Upah (150 orang x 3 hari, Rp. 125.000.000)	Masih rendahnya jumlah tenaga kerja yang terlindungi Hak-haknya	Ditolak			Double usulan dengan usulan sebelumnya. Usulan sebelumnya diproses, namun akan dikaji lagi terlebih dahulu dan anggaran menyesuaikan
58	5/4/2024	BARITO TIMUR	Sosialisasi Teknik Negosiasi Penyelesaian Hubungan Industrial (150 orang x 3 hari, Rp. 125.000.000)	Masih rendahnya jumlah tenaga kerja yang terlindungi Hak-haknya	Ditolak			Double usulan dengan usulan sebelumnya. Usulan sebelumnya diproses, namun akan dikaji lagi terlebih dahulu dan anggaran menyesuaikan
59	5/4/2024	BARITO SELATAN	Dalam rangka menurunkannya TPT di Kabupaten Barito Selatan Diperlukannya Pelatihan Kejuruan Teknik Otomotif di kalangan generasi muda masyarakat buntok	Meningkatnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kalimantan Tengah	Diproses	2.07.03.1.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	1 Paket	Double usulan dengan usulan sebelumnya. Diproses, namun jenis kejuruan akan dikaji lagi kemudian dan anggaran menyesuaikan
60	5/4/2024	BARITO SELATAN	Dalam rangka menurunkannya TPT di Kabupaten Barito Selatan Diperlukannya Pelatihan Kejuruan Teknik Listrik di kalangan generasi muda masyarakat buntok	Meningkatnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kalimantan Tengah	Diproses	2.07.03.1.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	1 Paket	Double usulan dengan usulan sebelumnya. Diproses, namun jenis kejuruan akan dikaji lagi kemudian dan anggaran menyesuaikan
61	5/4/2024	BARITO SELATAN	Dalam rangka menurunkannya TPT di Kabupaten Barito Selatan Diperlukannya Pelatihan Kejuruan Teknik Las di kalangan generasi muda masyarakat buntok	Meningkatnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kalimantan Tengah	Diproses	2.07.03.1.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	1 Paket	Double usulan dengan usulan sebelumnya. Diproses, namun jenis kejuruan akan dikaji lagi kemudian dan anggaran menyesuaikan

USULAN KABUPATEN/KOTA								
NO.	TGL	KAB/KOTA	PERMASALAHAN	USULAN	STATUS	SUB KEGIATAN	VOL/SATUAN	CATATAN
62	5/4/2024	BARITO SELATAN	Dalam rangka menurunkannya TPT di Kabupaten Barito Selatan Diperlukannya Pelatihan Kejuruan Processing di kalangan generasi muda masyarakat buntok	Meningkatnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kalimantan Tengah	Diproses	2.07.03.1.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	1 Paket	Double usulan dengan usulan sebelumnya. Diproses, namun jenis kejuruan akan dikaji lagi kemudian dan anggaran menyesuaikan
63	5/4/2024	BARITO SELATAN	Dalam rangka menurunkannya TPT di Kabupaten Barito Selatan Diperlukannya Pelatihan Kejuruan Teknik Komputer di kalangan generasi muda masyarakat buntok	Meningkatnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kalimantan Tengah	Diproses	2.07.03.1.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	1 Paket	Double usulan dengan usulan sebelumnya. Diproses, namun jenis kejuruan akan dikaji lagi kemudian dan anggaran menyesuaikan
64	5/4/2024	BARITO SELATAN	Dalam rangka menurunkannya TPT di Kabupaten Barito Selatan Diperlukannya Pelatihan Kejuruan Menjahit di kalangan generasi muda masyarakat buntok	Meningkatnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kalimantan Tengah	Diproses	2.07.03.1.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	1 Paket	Double usulan dengan usulan sebelumnya. Diproses, namun jenis kejuruan akan dikaji lagi kemudian dan anggaran menyesuaikan
65	5/4/2024	BARITO SELATAN	Dalam rangka menurunkannya TPT di Kabupaten Barito Selatan Diperlukannya Pelatihan Kejuruan Operator Alat Berat di kalangan generasi muda masyarakat buntok	Meningkatnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kalimantan Tengah	Ditolak			Pelatihan alat berat sudah dilaksanakan di kabupaten Barsel tahun 2023 lalu. Untuk tahun-tahun berikut prioritas ke kabupaten yang belum melaksanakan.

USULAN KABUPATEN/KOTA								
NO.	TGL	KAB/KOTA	PERMASALAHAN	USULAN	STATUS	SUB KEGIATAN	VOL/SATUAN	CATATAN
66	5/4/2024	BARITO SELATAN	Dalam rangka menurunkannya TPT di Kabupaten Barito Selatan Diperlukannya Pelatihan Bahasa Asing di kalangan generasi muda masyarakat buntok	Meningkatnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kalimantan Tengah	Ditolak			Keterbatasan sarana dan prasarana pelatihan, serta instruktur
67	5/4/2024	BARITO SELATAN	Dalam rangka menurunkannya TPT di Kabupaten Barito Selatan Diperlukannya Pelatihan Diksar Gada Pratama Satpam di kalangan masyarakat buntok	Meningkatnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kalimantan Tengah	Ditolak			Keterbatasan sarana dan prasarana pelatihan, serta instruktur
68	5/4/2024	BARITO SELATAN	Dalam rangka menurunkannya TPT di Kabupaten Barito Selatan Diperlukannya Pelatihan Tata Boga di kalangan generasi muda masyarakat buntok	Meningkatnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kalimantan Tengah	Diproses	2.07.04.1.01.0005 Perluasan Kesempatan Kerja	20 Orang	Usulan dapat diakomodir jika Disnakertrans Prov. Kalteng mendapatkan anggaran DBH-DR. Jenis pelatihan dan lokus akan dikaji lagi kemudian. Besar anggaran menyesuaikan.
69	5/4/2024	BARITO SELATAN	Dalam rangka menurunkannya TPT di Kabupaten Barito Selatan Diperlukannya Pelatihan Ayaman Rotan/Purun di kalangan masyarakat buntok	Meningkatnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kalimantan Tengah	Diproses	2.07.04.1.01.0005 Perluasan Kesempatan Kerja	20 Orang	Usulan dapat diakomodir jika Disnakertrans Prov. Kalteng mendapatkan anggaran DBH-DR. Jenis pelatihan dan lokus akan dikaji lagi kemudian. Besar anggaran menyesuaikan.
70	5/4/2024	BARITO SELATAN	Dalam rangka menurunkannya TPT di Kabupaten Barito Selatan Diperlukannya Pelatihan Pembuatan Pakan Ternak di kalangan masyarakat buntok	Meningkatnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kalimantan Tengah	Diproses	2.07.04.1.01.0005 Perluasan Kesempatan Kerja	20 Orang	Usulan dapat diakomodir jika Disnakertrans Prov. Kalteng mendapatkan anggaran DBH-DR. Jenis pelatihan dan lokus akan dikaji lagi kemudian. Besar anggaran menyesuaikan.

USULAN KABUPATEN/KOTA								
NO.	TGL	KAB/KOTA	PERMASALAHAN	USULAN	STATUS	SUB KEGIATAN	VOL/SATUAN	CATATAN
71	5/4/2024	BARITO SELATAN	Dalam rangka menurunkannya TPT di Kabupaten Barito Selatan Diperlukannya Pelatihan Budi Daya Jamur Tiram di kalangan masyarakat buntok	Meningkatnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kalimantan Tengah	Diproses	2.07.04.1.01.0005 Perluasan Kesempatan Kerja	20 Orang	Usulan dapat diakomodir jika Disnakertrans Prov. Kalteng mendapatkan anggaran DBH-DR. Jenis pelatihan dan lokus akan dikaji lagi kemudian. Besar anggaran menyesuaikan.
72	5/4/2024	BARITO SELATAN	Dalam rangka menurunkannya TPT di Kabupaten Barito Selatan Diperlukannya Pelatihan Pupuk Organik di kalangan masyarakat buntok	Meningkatnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kalimantan Tengah	Diproses	2.07.04.1.01.0005 Perluasan Kesempatan Kerja	20 Orang	Usulan dapat diakomodir jika Disnakertrans Prov. Kalteng mendapatkan anggaran DBH-DR. Jenis pelatihan dan lokus akan dikaji lagi kemudian. Besar anggaran menyesuaikan.
73	5/4/2024	BARITO SELATAN	Dalam rangka menurunkannya TPT di Kabupaten Barito Selatan Diperlukannya Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Meningkatnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kalimantan Tengah	Ditolak			Berdasar UU 23/2014 kewenangan Provinsi PBJ tingkat Provinsi, kewenangan Kab/Kota PBJ tingkat Kab/Kota.
74	5/4/2024	BARITO SELATAN	Dalam rangka pelatihan Kejuruan Otomotif diperlukannya Mobil Operasional MTU (Mobile Training Unit) Kejuruan Otomotif untuk sebagai sarana fasilitas penunjang	Meningkatnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kalimantan Tengah	Ditolak			Pengadaan sarpras termasuk kewenangan masing-masing pemda. Selain itu, saat ini hibah ke Pemkab juga di luar prioritas Disnakertrans Prov. Kalteng.
75	5/4/2024	BARITO SELATAN	Dalam rangka pelatihan Kejuruan Tata Rias diperlukannya Mobil Operasional MTU (Mobile Training Unit) Kejuruan Tata Rias untuk sebagai sarana fasilitas penunjang	Meningkatnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kalimantan Tengah	Ditolak			Pengadaan sarpras termasuk kewenangan masing-masing pemda. Selain itu, saat ini hibah ke Pemkab juga di luar prioritas Disnakertrans Prov. Kalteng.

USULAN KABUPATEN/KOTA								
NO.	TGL	KAB/KOTA	PERMASALAHAN	USULAN	STATUS	SUB KEGIATAN	VOL/SATUAN	CATATAN
76	5/4/2024	BARITO SELATAN	Dalam rangka pelatihan Kejuruan Processing diperlukannya Mobil Operasional MTU (Mobile Training Unit) Kejuruan Processing untuk sebagai sarana fasilitas penunjang	Meningkatnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kalimantan Tengah	Ditolak			Pengadaan sarpras termasuk kewenangan masing-masing pemda. Selain itu, saat ini hibah ke Pemkab juga di luar prioritas Disnakertrans Prov. Kalteng.
77	5/4/2024	SUKAMARA	Belum Tersedianya Fasum yang layak pakai dalam menunjang pelayanan masyarakat Transmigrasi, Diperlukan Bantuan Rumah Transmigrasi Jamban Keluarga (RTJK) 90 Unit	Kepemilikan lahan yang tumpang tindih dengan lahan perkebunan swasta	Ditolak			Belum menjadi prioritas Disnakertrans Prov. Kalteng tahun 2025. Rekomendasi: Usulan diajukan ke Pusat (APBN)
78	5/4/2024	SUKAMARA	Belum Tersedianya kantor UPT yang layak pakai dan fungsional untuk menunjang pelayanan masyarakat Transmigrasi, Diperlukan Bantuan Kantor UPT SDT 90 KK SP1 Pulau Nibung. 1 Unit	Kepemilikan lahan yang tumpang tindih dengan lahan perkebunan swasta	Ditolak			Belum menjadi prioritas Disnakertrans Prov. Kalteng tahun 2025. Rekomendasi: Usulan diajukan ke Pusat (APBN)
79	5/4/2024	SUKAMARA	Belum Tersedianya rumah kepala UPT yang layak pakai dan fungsional untuk menunjang pelayanan masyarakat Transmigrasi, Diperlukan Bantuan Rumah KUPT SDT 90 KK SP1 Pulau Nibung. 1 Unit	Kepemilikan lahan yang tumpang tindih dengan lahan perkebunan swasta	Ditolak			Belum menjadi prioritas Disnakertrans Prov. Kalteng tahun 2025. Rekomendasi: Usulan diajukan ke Pusat (APBN)
80	5/4/2024	SUKAMARA	Belum Tersedianya Saprass mendukung produktifitas pertanian, Diperlukan Bantuan Gudang Pangan SDT 90 KK SP1 Pulau Nibung. 1 Unit	Kepemilikan lahan yang tumpang tindih dengan lahan perkebunan swasta	Ditolak			Belum menjadi prioritas Disnakertrans Prov. Kalteng tahun 2025. Rekomendasi: Usulan diajukan ke Pusat (APBN)

USULAN KABUPATEN/KOTA								
NO.	TGL	KAB/KOTA	PERMASALAHAN	USULAN	STATUS	SUB KEGIATAN	VOL/SATUAN	CATATAN
81	5/4/2024	SUKAMARA	Belum tersedianya Fasos yang layak pakai dalam menunjang pelayanan masyarakat Transmigrasi, Diperlukan Bantuan Masjid SDT 90 KK SP1 Pulau Nibung. 1 Paket	Kepemilikan lahan yang tumpang tindih dengan lahan perkebunan swasta	Ditolak			Belum menjadi prioritas Disnakertrans Prov. Kalteng tahun 2025. Rekomendasi: Usulan diajukan ke Pusat (APBN)
82	5/4/2024	SUKAMARA	Agar jalan poros SP.1 Pulau Nibung Fungsional untuk akses keseharian warga dan memperlancar mobilisasi pembangunan SP.1 Pulau Nibung, Diperlukan Bantuan Peningkatan Jalan Poros Lokasi SDT 90 KK SP1 Pulau Nibung. 1,34 KM	Kepemilikan lahan yang tumpang tindih dengan lahan perkebunan swasta	Ditolak			Belum menjadi prioritas Disnakertrans Prov. Kalteng tahun 2025. Rekomendasi: Usulan diajukan ke Pusat (APBN)
83	5/4/2024	SUKAMARA	Agar jalan Lahan Usaha I dan Lahan Usaha II SP.1 Pulau Nibung Fungsional untuk akses keseharian warga dan memperlancar mobilisasi pembangunan SP.1 Pulau Nibung, Diperlukan Bantuan Pembuatan Jalan Lahan Usaha Lokasi SDT 90 KK Pulau Nibung. 1 Paket	Kepemilikan lahan yang tumpang tindih dengan lahan perkebunan swasta	Ditolak			Belum menjadi prioritas Disnakertrans Prov. Kalteng tahun 2025. Rekomendasi: Usulan diajukan ke Pusat (APBN)
84	5/4/2024	SUKAMARA	Agar Terkelolanya tata air di Kawasan Transmigrasi, Diperlukan Bantuan Pembuatan Saluran. 15.696 M3	Kepemilikan lahan yang tumpang tindih dengan lahan perkebunan swasta	Ditolak			Belum menjadi prioritas Disnakertrans Prov. Kalteng tahun 2025. Rekomendasi: Usulan diajukan ke Pusat (APBN)

USULAN KABUPATEN/KOTA								
NO.	TGL	KAB/KOTA	PERMASALAHAN	USULAN	STATUS	SUB KEGIATAN	VOL/SATUAN	CATATAN
85	5/4/2024	SUKAMARA	Agar Tersiapkannya lahan untuk Lahan Permukiman ,LP, LU I dan LU II di Kawasan Transmigrasi. Diperlukan Bantuan Land Clearing Lokasi SDT 90 KK SP1 Pulau Nibung. 1.840.000 M2	Kepemilikan lahan yang tumpang tindih dengan lahan perkebunan swasta	Ditolak			Belum menjadi prioritas Disnakertrans Prov. Kalteng tahun 2025. Rekomendasi: Usulan diajukan ke Pusat (APBN)
86	5/4/2024	SUKAMARA	Belum Tersedianya air bersih yang layak untuk warga lokasi SDT 90 KK SP 1 Pulau Nibung. Diperlukan Bantuan Jaringan Distribusi Air Bersih (SAB) Lokasi SDT 90 KK SP1 Pulau Nibung. 1 Paket	Kepemilikan lahan yang tumpang tindih dengan lahan perkebunan swasta	Ditolak			Belum menjadi prioritas Disnakertrans Prov. Kalteng tahun 2025. Rekomendasi: Usulan diajukan ke Pusat (APBN)
87	5/4/2024	SUKAMARA	Belum Tersedianya Instalasi Jaringan Listrik untuk warga lokasi SDT 90 KK SP 1 Pulau Nibung, Diperlukan Bantuan Instalasi Jaringan Listrik Lokasi SDT 90 KK SP1 Pulau Nibung. 1 Paket	Kepemilikan lahan yang tumpang tindih dengan lahan perkebunan swasta	Ditolak			Belum menjadi prioritas Disnakertrans Prov. Kalteng tahun 2025. Rekomendasi: Usulan diajukan ke Pusat (APBN)
88	5/4/2024	SUKAMARA	Belum tersedianya Fasum yang layak pakai dalam menunjang pelayanan masyarakat Transmigrasi, Diperlukan Bantuan Biaya Pengawasan Pembangunan. 1 Paket	Kepemilikan lahan yang tumpang tindih dengan lahan perkebunan swasta	Ditolak			Belum menjadi prioritas Disnakertrans Prov. Kalteng tahun 2025. Rekomendasi: Usulan diajukan ke Pusat (APBN)

USULAN KABUPATEN/KOTA								
NO.	TGL	KAB/KOTA	PERMASALAHAN	USULAN	STATUS	SUB KEGIATAN	VOL/SATUAN	CATATAN
89	5/4/2024	SUKAMARA	Belum tersedianya Fasum yang layak pakai dalam menunjang pelayanan masyarakat Transmigrasi, Diperlukan bantuan Perencanaan Sarana Air Bersih (SAB). 1 Paket	Kepemilikan lahan yang tumpang tindih dengan lahan perkebunan swasta	Ditolak			Belum menjadi prioritas Disnakertrans Prov. Kalteng tahun 2025. Rekomendasi: Usulan diajukan ke Pusat (APBN)
90	5/4/2024	SUKAMARA	Belum tersedianya Fasum yang layak pakai dalam menunjang pelayanan masyarakat Transmigrasi, Diperlukan Bantuan Pembuatan Sumur Bor dalam Lokasi SDT 90 KKSP1 Pulau Nibung. 3 Unit	Kepemilikan lahan yang tumpang tindih dengan lahan perkebunan swasta	Ditolak			Belum menjadi prioritas Disnakertrans Prov. Kalteng tahun 2025. Rekomendasi: Usulan diajukan ke Pusat (APBN)
91	5/4/2024	MURUNG RAYA	Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Murung Raya yang masih rendah	Menurunnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Diproses	2.07.04.1.01.0005 Perluasan Kesempatan Kerja	1 Paket	Perlu dijelaskan kegiatan pelatihan TTG seperti apa yang dibutuhkan. Jenis pelatihan dan lokus akan dikaji terlebih dahulu. Besar anggaran menyesuaikan.
92	5/4/2024	MURUNG RAYA	Masih tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka dan Setengah Menganggur	Meningkatnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kalimantan Tengah	Diproses	2.07.04.1.01.0005 Perluasan Kesempatan Kerja	1 Paket	Perlu dijelaskan kegiatan pelatihan TKM seperti apa yang dibutuhkan. Jenis pelatihan dan lokus akan dikaji terlebih dahulu. Besar anggaran menyesuaikan.
93	5/4/2024	BARITO UTARA	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja dan Penempatan pasar kerja (Sosialisasi)	Menurunnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Ditolak			Pengelolaan Informasi Pasar Kerja merupakan kewenangan masing-masing Pemda. Terkait sosialisasi akan dikaji terlebih dahulu, bila dilaksanakan menyeluruh ke semua kab/kota
94	5/4/2024	BARITO UTARA	Pameran Kesempatan Kerja (JOB FAIR)	Menurunnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Diproses	2.07.04.1.03.0003 Job Fair/Bursa Kerja	1 Paket	Berdasar UU 23/2014 kewenangan Provinsi job fair tingkat Provinsi, kewenangan Kab/Kota job fair tingkat Kab/Kota. Lokus kegiatan akan dikaji terlebih dahulu
95	5/4/2024	BARITO UTARA	Pelatihan Operator Alat Berat Excavator	Meningkatnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kalimantan Tengah	Diproses	2.07.03.1.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	1 Paket	Berbasis kompetensi. Anggaran menyesuaikan.

USULAN KABUPATEN/KOTA								
NO.	TGL	KAB/KOTA	PERMASALAHAN	USULAN	STATUS	SUB KEGIATAN	VOL/SATUAN	CATATAN
96	5/4/2024	BARITO UTARA	Pelatihan Operator Alat Berat Dump Truck	Meningkatnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kalimantan Tengah	Ditolak			Keterbatasan sarana dan prasarana pelatihan, serta instruktur
97	5/4/2024	BARITO UTARA	Pelatihan Driver Sarana LV	Meningkatnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kalimantan Tengah	Ditolak			Keterbatasan sarana dan prasarana pelatihan, serta instruktur
98	5/4/2024	BARITO UTARA	Pelatihan administrasi perkantoran	Meningkatnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kalimantan Tengah	Ditolak			Keterbatasan sarana dan prasarana pelatihan, serta instruktur
99	24-04-2024	KOTAWARINGI N TIMUR	Terbatasnya Tenaga Las yang memiliki sertifikasi. Sebanyak 15 Peserta Rp.46.500.000,-	Masih Rendahnya Kompetensi Tenaga Kerja	Ditolak			Saat ini belum ada Lembaga Sertifikasi
100	24-04-2024	KOTAWARINGI N TIMUR	Terbatasnya pelatihan teknisi sepeda motor. Sebanyak 15 Peserta Rp.75.000.000,-	Masih Rendahnya Kompetensi Tenaga Kerja	Ditolak			Double Usulan dengan Usulan sebelumnya
101	24-04-2024	KOTAWARINGI N TIMUR	Terbatasnya Tenaga Operator Komputer Muda. Sebanyak 15 Peserta Rp.38.000.000,-	Masih Rendahnya Kompetensi Tenaga Kerja	Diproses	2.07.03.1.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	1 Paket	Berbasis kompetensi dan tersedia sarana dan prasarana pelatihan, serta instruktur. Anggaran menyesuaikan.
102	24-04-2024	KOTAWARINGI N TIMUR	Terbatasnya Tenaga Instalasi Listrik. Sebanyak 15 Peserta Rp.38.000.000,-	Masih Rendahnya Kompetensi Tenaga Kerja	Ditolak			Sudah pernah diadakan di Kotim tahun 2023, bergantian dengan kab/kota lain
103	24-04-2024	KOTAWARINGI N TIMUR	Terbatasnya tenaga kerja Bakery yang mempunyai sertifikasi. Sebanyak 15 Peserta Rp.38.000.000,-	Masih Rendahnya Kompetensi Tenaga Kerja	Ditolak			Saat ini belum ada Lembaga Sertifikasi

USULAN KABUPATEN/KOTA								
NO.	TGL	KAB/KOTA	PERMASALAHAN	USULAN	STATUS	SUB KEGIATAN	VOL/SATUAN	CATATAN
104	24-04-2024	KOTAWARINGI N TIMUR	Terbatasnya pelatihan Menjahit Pakaian. Sebanyak 15 Peserta Rp.38.000.000,-	Masih Rendahnya Kompetensi Tenaga Kerja	Diproses	2.07.03.1.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	1 Paket	Berbasis kompetensi dan tersedia sarana dan prasarana pelatihan, serta instruktur. Anggaran menyesuaikan.
105	24-04-2024	KOTAWARINGI N TIMUR	Terbatasnya Teknisi Hand Phone yang terlatih dan bersertifikat. Sebanyak 15 Peserta Rp.38.000.000,-	Masih Rendahnya Kompetensi Tenaga Kerja	Ditolak			Keterbatasan sarana dan prasarana pelatihan, serta instruktur dan saat ini belum ada Lembaga Sertifikasi
106	24-04-2024	KOTAWARINGI N TIMUR	Hibah uang bantuan pelaksanaan pelatihan di LPK Borneo Hospitality School sebanyak 32 orang dengan kebutuhan dana Rp. 166.400.000,-	Masih Rendahnya Kompetensi Tenaga Kerja	Ditolak			Tidak terdapat di Renstra dan bukan prioritas 2025
107	24-04-2024	KOTAWARINGI N TIMUR	Hibah uang bantuan pelaksanaan pelatihan di LPK Rejeki Jaya Kalawa sebanyak 22 orang dengan kebutuhan dana Rp. 50.000.000,-	Masih Rendahnya Kompetensi Tenaga Kerja	Ditolak			Tidak terdapat di Renstra dan bukan prioritas 2025

Usulan-usulan yang disetujui untuk dibiayai melalui APBD Provinsi Kalimantan Tengah karena sesuai dengan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026, serta diharapkan bisa mendukung program pembangunan daerah tahun 2025.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Agenda dan sasaran Pembangunan Ketenagakerjaan merupakan bagian dari agenda dan sasaran pembangunan nasional, pembangunan bidang ekonomi, pembangunan lintas bidang, dan pembangunan wilayah demi terwujudnya Visi dan Misi pembangunan nasional. Pembangunan Ketenagakerjaan dalam ini kerangka Agenda Pembangunan Nasional masuk ke dalam agenda pertama dan keenam dari NAWACITA, yaitu:

- a. Agenda prioritas “Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memmberikan rasa aman kepada seluruh warga negara melalui perlindungan Hak dan Keselamatan Pekerja Migran;” dan
- b. Agenda prioritas “Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar.

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran-sasaran tersebut, maka dirumuskan 9 agenda prioritas pembangunan bidang ketenagakerjaan yang disebut dengan **NAWA KERJA KETENAGAKERJAAN**, yaitu:

- a. Penguatan Perencanaan Tenaga Kerja Nasional;
- b. Percepatan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja;
- c. Percepatan Sertifikasi Profesi;
- d. Perluasan Kesempatan Kerja Formal;
- e. Penguatan Wirausaha Produktif;
- f. Penciptaan Hubungan Industrial yang Sehat dan Produktif;
- g. Penegakan Hukum Ketenagakerjaan;
- h. Peningkatan Perlindungan Pekerja Migran;
- i. Pelayanan Ketenagakerjaan Sederhana, Transparan dan Akuntabel.

Sedangkan untuk transmigrasi, salah satu sasaran strategis pembangunan nasional adalah ***“Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa Dalam Kerangka Negara Kesatuan”***, sebagaimana disebutkan pada Prioritas Nawacita ke-3. Membangun dari pinggiran harus dipahami dalam perspektif yang utuh, yakni sebagai afirmasi untuk mendorong kegiatan ekonomi yang selami ini kurang diprioritaskan pemerintah. Kegiatan ekonomi dalam wujud wilayah

(perdesaan/perbatasan/daerah tertinggal), sektor (pertanian), pelaku (usaha mikro dan kecil), atau karakter aktivitas ekonomi (tradisional).

Adapun kebijakan dan strategi pembangunan transmigrasi adalah:

a. Penyiapan Kawasan Pembangunan Permukiman Transmigrasi

Penyiapan Kawasan Pembangunan Permukiman Transmigrasi mencakup:

- 1) Perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi, termasuk pembinaan potensi kawasan, kerjasama antar daerah dan perencanaan sarana dan prasarana, penataan dan persebaran penduduk, serta perencanaan pengembangan masyarakatnya;
- 2) Penyediaan lahan transmigrasi, melalui penyediaan lahan tempat tinggal dan lahan usaha;
- 3) Pemenuhan prasarana dan sarana dasar di permukiman transmigrasi sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) nasional, meliputi: Pembangunan prasarana dan sarana dasar, lokasi permukiman transmigrasi di daerah tertinggal, strageis dan cepat tumbuh dan perbatasan: jalan lokal primer, jalan lingkungan, drainase dan dermaga, pelayanan pendidikan dasar setingkat sekolah dasar, pelayanan kesehatan setingkat pos kesehatan desa, perumahan, dan sarana pelayanan umum.

b. Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Pengembangan Kawasan Transmigrasi meliputi pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi yang diarahkan pada daerah tertinggal, dan perbatasan dan serta strategis cepat tumbuh, mencakup:

- 1) Pengembangan Promosi dan Kemitraan meliputi Publikasi dan Promosi, Kerjasama Badan Usaha, Masyarakat dan Lembaga Pemerintah.
- 2) Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana kawasan transmigrasi, meliputi: Pengembangan Sarana dan Prasarana di Satuan Permukiman (SP), Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana di KPB, SKP, Kawasan Transmigrasi; dan Penyerasian Lingkungan.

- 3) Pengembangan usaha ekonomi transmigrasi, meliputi: peningkatan produksi pengolahan hasil dan pemasaran, pengembangan kelembagaan ekonomi dan permodalan, serta pengembangan kewirausahaan di kawasan Transmigrasi.
- 4) Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi meliputi: Pangan, fasilitas Kesehatan, Pendidikan, Mental Spiritual dan Kelembagaan di kawasan Transmigrasi.
- 5) Pelayanan Pertanahan Transmigrasi meliputi Sertifikasi kepemilikan lahan dan penanganan masalah pertanahan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan pembangunan Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian banyak permasalahan yang dihadapi yang perlu solusi pemecahan yang komprehensif dan koordinatif antara Kabupaten/Kota dengan Provinsi. Permasalahan mendasar yang dihadapi di bidang Ketenagakerjaan antara lain:

Tingginya angka pengangguran dan kurangnya penciptaan lapangan kerja yang produktif, masih rendahnya kompetensi pencari kerja sehingga sulit terserap ke Pasar Kerja, Hubungan Industrial yang belum harmonis dan kurangnya pengawasan ketenagakerjaan karena keterbatasan jumlah pegawai pengawas, sementara cakupan perusahaan yang harus diawasi meliputi 14 Kabupaten/Kota.

Program transmigrasi di Kalimantan Tengah sangat berperan dalam pembangunan daerah, sehingga dari yang semula Provinsi Kalimantan Tengah hanya terdiri dari 5 kabupaten dan 1 kota sekarang berkembang menjadi 13 kabupaten dan 1 kota. Dalam perkembangannya beberapa lokasi transmigrasi telah berhasil dan berkembang dengan baik dan menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru serta berkembang menjadi fungsi-fungsi perkotaan yang telah memberikan kontribusi bagi percepatan pembangunan daerah Kalimantan Tengah.

Namun demikian harus diakui pula bahwa beberapa diantaranya belum berkembang dan mengalami kegagalan bahkan ada yang masuk kategori desa tertinggal sehingga tidak sejalan dengan maksud yang terkandung dalam UU Nomor 29 Tahun 2009 tersebut diatas dan pada akhirnya menjadi beban pemerintah daerah. Berbagai permasalahan yang sering muncul diantaranya adalah masalah pertanahan misalnya tumpang tindih peruntukan

lahan transmigran, adanya okupasi penduduk setempat terhadap lahan transmigran dan masalah sertifikasi lahan transmigran, serta adanya kecemburuan sosial bagi penduduk desa sekitar.

Berdasarkan permasalahan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang telah disebutkan di atas maka melalui Penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah dalam kerangka untuk mewujudkan Visi Kalimantan Tengah maka menetapkan tujuan dan sasaran Rencana Kerja sebagai berikut:

Tujuan :

Tujuan rencana strategis yang hendak dicapai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah:

1. Meningkatkan Pembangunan Ketenagakerjaan
2. Menyiapkan rencana penetapan dan mengembangkan Kawasan Transmigrasi untuk mendukung pembangunan ekonomi

Sasaran :

Sedangkan pencapaian sasaran sebagaimana dua tujuan dimaksud, adalah:

1. Meningkatnya kualitas perencanaan tenaga kerja
2. Terwujudnya pemberdayaan dan pendayagunaan angkatan kerja secara optimal
3. Tersedianya kesempatan kerja dalam jumlah dan kualitas yang memadai
4. Meningkatnya kompetensi tenaga kerja
5. Meningkatnya produktivitas tenaga kerja
6. Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis dan dinamis
7. Terciptanya lingkungan kerja yang aman dan sehat
8. Meningkatnya kesejahteraan pekerja
9. Tersedianya jaminan sosial tenaga kerja dan keluarganya
10. Tersedianya permukiman transmigrasi baru atau pemenuhan daya tampung
11. Berkembangnya Kawasan Transmigrasi Existing

3.3 Program dan Kegiatan

Rumusan Program dan Kegiatan Tahun 2025 memiliki beberapa faktor yang menjadi bahan pertimbangan diantaranya adalah:

1. Program yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah telah mengacu pada program yang terdapat pada Program dan Kegiatan berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dengan pemutakhiran terbaru sesuai Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 05.05.889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.
2. Program dan Kegiatan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketrasmigrasian Provinsi Kalimantan Tengah mengacu program dan kebijakan nasional.

Adapun Program dan Kegiatan pada Tahun Anggaran ini adalah sebanyak 9 Program yang terdiri dari 21 Kegiatan dan 61 Sub Kegiatan, yang dapat dilihat sebagai berikut:

URUSAN TENAGA KERJA

A Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

- I Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 3 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - 4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 5 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- II Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 6 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 7 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 8 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 9 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - 10 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- III Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 11 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - 12 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- IV Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 13 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 14 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - 15 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - 16 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 17 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - 18 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

- V Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 19 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 20 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 21 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 22 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 23 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 24 Fasilitas Kunjungan Tamu
 - 25 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 26 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- VI Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 27 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 28 Pengadaan Mebel
 - 29 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- VII Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 30 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 31 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 32 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- VIII Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 33 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 34 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 35 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
 - 36 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 37 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- B Program Perencanaan Tenaga Kerja**
 - IX Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
 - 38 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
 - 39 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro
- C Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja**
 - X Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
 - 40 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
 - 41 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja
 - XI Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah
 - 42 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah
- D Program Penempatan Tenaga Kerja**
 - XII Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - 43 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - 44 Perluasan Kesempatan Kerja
 - 45 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
 - XIII Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
 - 46 Job Fair/Bursa Kerja
 - XIV Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

- 47 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

E Program Hubungan Industrial

- XV Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota
 - 48 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
- XVI Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi
 - 49 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi
 - 50 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi
 - 51 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi
- XVII Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)
 - 52 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)
 - 53 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja

F Program Pengawasan Ketenagakerjaan

- XVIII Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan
 - 54 Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan
 - 55 Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan
 - 56 Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan

URUSAN TRANSMIGRASI

G Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi

- XIX Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi
 - 57 Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi
 - 58 Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan

H Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

- XX Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
 - 59 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

I Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

- XXI Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan
 - 60 Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman
 - 61 Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah, berupaya untuk mengentaskan kemiskinan di Kalimantan Tengah dengan melakukan pembinaan terhadap tenaga kerja dan transmigran untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki baik SDM maupun SDA, pendatang maupun masyarakat setempat untuk dapat meningkatkan keterampilan, potensi kehidupan ekonomi, sosial budaya, dan kondisi lingkungan. Disamping itu, peningkatan kualitas tenaga kerja sehingga mampu bersaing di pasar kerja yang tersedia baik lokal maupun nasional, menciptakan hubungan industrial yang harmonis, iklim usaha yang kondusif sehingga mampu menarik investor untuk menanamkan modalnya di Kalimantan Tengah. Hal ini memerlukan penanganan yang lebih serius, berkesinambungan dan komprehensif sehingga mampu meningkatkan kualitas tenaga kerja dan transmigrasi di Kalimantan Tengah.

Pengembangan daerah terisolir di daerah transmigrasi bertujuan untuk memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam yang belum dimanfaatkan, sehingga pengolahan/pemanfaatan lahan usaha diupayakan bisa optimal.

Untuk Tahun 2025 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah membutuhkan Pagu Indikatif sebesar Rp36.369.178.236,00 (Tiga Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) untuk melaksanakan Program/Kegiatan di Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian yang berlokasi di dalam Provinsi Kalimantan Tengah, luar daerah atau menyesuaikan dengan tujuan program dan kegiatan tersebut. Melalui Sumber Dana APBD Provinsi Kalimantan Tengah diusulkan 9 Program dan 21 Kegiatan yang terdiri dari 61 Sub Kegiatan.

Tabel 4.1.
Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
Dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu RKPD 2025 (Rp)	Prakiraan Maju 2026 (Rp)
			Tolak Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6	7
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			33.669.178.236,00	35.474.336.785,00
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			33.669.178.236,00	35.474.336.785,00
A	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keterlaksanaan	100,00 Persen	25.194.178.236,00	26.567.052.785,00
I	2.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya data perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	12,00 Bulan	570.000.000,00	615.397.000,00
1	2.07.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,00 Dokumen	300.000.000,00	312.648.000,00
2	2.07.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1,00 Dokumen	35.000.000,00	40.264.000,00
3	2.07.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1,00 Dokumen	35.000.000,00	40.264.000,00
4	2.07.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4,00 Laporan	50.000.000,00	65.897.000,00
5	2.07.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4,00 Laporan	150.000.000,00	156.324.000,00
II	2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terkelolanya administrasi keuangan	12,00 Bulan	17.492.361.726,00	18.255.192.785,00

No.	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu RKPD 2025 (Rp)	Prakiraan Maju 2026 (Rp)
			Tolak Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6	7
6	2.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	150,00 Orang	17.187.361.726,00	17.911.281.785,00
7	2.07.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4,00 Dokumen	275.000.000,00	312.648.000,00
8	2.07.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,00 Laporan	10.000.000,00	10.421.000,00
9	2.07.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4,00 Laporan	10.000.000,00	10.421.000,00
10	2.07.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4,00 Laporan	10.000.000,00	10.421.000,00
III	2.07.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terkelolanya administrasi barang milik daerah	12,00 Bulan	90.000.000,00	96.161.000,00
11	2.07.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1,00 Dokumen	15.000.000,00	15.632.000,00
12	2.07.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1,00 Laporan	75.000.000,00	80.529.000,00
IV	2.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	12,00 Bulan	475.000.000,00	524.123.000,00
13	2.07.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3,00 Paket	250.000.000,00	260.540.000,00
14	2.07.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2,00 Dokumen	30.000.000,00	35.000.000,00

No.	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu RKPD 2025 (Rp)	Prakiraan Maju 2026 (Rp)
			Tolak Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6	7
15	2.07.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4,00 Dokumen	10.000.000,00	15.000.000,00
16	2.07.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5,00 Orang	85.000.000,00	88.583.000,00
17	2.07.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	150,00 Orang	60.000.000,00	75.000.000,00
18	2.07.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4,00 Orang	40.000.000,00	50.000.000,00
V	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terkelolanya administrasi umum	12,00 Bulan	985.000.000,00	1.062.310.000,00
19	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1,00 Paket	15.000.000,00	15.632.000,00
20	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1,00 Paket	100.000.000,00	104.216.000,00
21	2.07.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1,00 Paket	25.000.000,00	26.054.000,00
22	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1,00 Paket	30.000.000,00	31.264.000,00
23	2.07.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3.000,00 Dokumen	15.000.000,00	15.632.000,00
24	2.07.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12,00 Laporan	100.000.000,00	104.216.000,00
25	2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2,00 Laporan	500.000.000,00	556.864.000,00

No.	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu RKPD 2025 (Rp)	Prakiraan Maju 2026 (Rp)
			Tolak Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6	7
26	2.07.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1,00 Dokumen	200.000.000,00	208.432.000,00
VI	2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah	12,00 Bulan	1.335.000.000,00	1.386.489.000,00
27	2.07.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3,00 Unit	570.000.000,00	585.869.000,00
28	2.07.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1,00 Paket	165.000.000,00	175.324.000,00
29	2.07.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25,00 Unit	600.000.000,00	625.296.000,00
VII	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya jasa penunjang disnakertrans	12,00 Bulan	1.846.816.510,00	1.920.464.000,00
30	2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,00 Laporan	20.000.000,00	20.843.000,00
31	2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1,00 Laporan	514.966.763,00	536.678.000,00
32	2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1,00 Laporan	1.311.849.747,00	1.362.943.000,00
VIII	2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah	12,00 Bulan	2.400.000.000,00	2.706.916.000,00
33	2.07.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4,00 Unit	150.000.000,00	156.324.000,00
34	2.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25,00 Unit	100.000.000,00	104.216.000,00
35	2.07.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2,00 Unit	100.000.000,00	104.216.000,00

No.	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu RKPD 2025 (Rp)	Prakiraan Maju 2026 (Rp)
			Tolak Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6	7
36	2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1,00 Unit	1.300.000.000,00	1.521.080.000,00
37	2.07.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1,00 Unit	750.000.000,00	821.080.000,00
B	2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Indeks Perencanaan Tenaga Kerja	9,70 Angka Indeks	625.000.000,00	643.188.000,00
IX	2.07.02.1.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Terlaksananya penyusunan rencana tenaga kerja	1,00 Paket	625.000.000,00	643.188.000,00
38	2.07.02.1.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1,00 Dokumen	350.000.000,00	362.648.000,00
39	2.07.02.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang Mengikuti Pelatihan Penyusunan RTK Mikro	28,00 Orang	275.000.000,00	280.540.000,00
C	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Indeks Pelatihan dan Kompetensi Kerja Indeks Penduduk dan Tenaga Kerja Indeks Produktivitas Tenaga Kerja	12,38 Angka Indeks 7,88 Angka Indeks 6,40 Angka Indeks	3.000.000.000,00	3.165.942.000,00
X	2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Terlaksananya pelatihan tenaga kerja	1,00 Tahun	2.750.000.000,00	2.905.402.000,00
40	2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	250,00 Orang	2.250.000.000,00	2.384.322.000,00
41	2.07.03.1.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	1,00 Unit	500.000.000,00	521.080.000,00
XI	2.07.03.1.03	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	Terlaksananya konsultansi produktivitas pada perusahaan	1,00 Tahun	250.000.000,00	260.540.000,00

No.	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu RKPD 2025 (Rp)	Prakiraan Maju 2026 (Rp)
			Tolak Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6	7
42	2.07.03.1.03.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	20,00 Perusahaan	250.000.000,00	260.540.000,00
D	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Indeks Kesempatan Kerja	13,43 Angka Indeks	1.650.000.000,00	1.763.240.000,00
XII	2.07.04.1.01	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelayanan antar kerja	1,00 Tahun	1.150.000.000,00	1.224.268.000,00
43	2.07.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	1.000,00 Orang	300.000.000,00	312.648.000,00
44	2.07.04.1.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	75,00 Orang	700.000.000,00	755.296.000,00
45	2.07.04.1.01.0006	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitasi layanan ULD	20,00 Orang	150.000.000,00	156.324.000,00
XIII	2.07.04.1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Tersedianya data informasi pasar kerja	1,00 Tahun	250.000.000,00	278.432.000,00
46	2.07.04.1.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	100,00 Orang	250.000.000,00	278.432.000,00
XIV	2.07.04.1.05	Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah RPTKA yang disahkan	20,00 RPTKA	250.000.000,00	260.540.000,00
47	2.07.04.1.05.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah TKA yang telah Mendapatkan Pengesahan RPTKA	100,00 Orang	250.000.000,00	260.540.000,00
E	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Indeks Jaminan Sosial Tenaga KerjaIndeks Hubungan IndustrialIndeks Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja	10,00 Angka Indeks 4,35 Angka Indeks 9,56 Angka Indeks	1.500.000.000,00	1.563.240.000,00

No.	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu RKPD 2025 (Rp)	Prakiraan Maju 2026 (Rp)
			Tolak Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6	7
XV	2.07.05.1.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	Tersedianya data hubungan industrial	1,00 Tahun	250.000.000,00	260.540.000,00
48	2.07.05.1.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek	20,00 Laporan	250.000.000,00	260.540.000,00
XVI	2.07.05.1.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis di perusahaan	3,00 Paket	750.000.000,00	781.620.000,00
49	2.07.05.1.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	10,00 Perkara	250.000.000,00	260.540.000,00
50	2.07.05.1.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	10,00 Perkara	250.000.000,00	260.540.000,00
51	2.07.05.1.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	364,00 Asosiasi	250.000.000,00	260.540.000,00

No.	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu RKPD 2025 (Rp)	Prakiraan Maju 2026 (Rp)
			Tolak Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6	7
XVII	2.07.05.1.03	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	UMP ditetapkan	1,00 Paket	500.000.000,00	521.080.000,00
52	2.07.05.1.03.0001	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah Penetapan UMP	1,00 Surat Keputusan	250.000.000,00	260.540.000,00
53	2.07.05.1.03.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	526.190,00 Orang	250.000.000,00	260.540.000,00
F	2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Indeks Kondisi Lingkungan Kerja	7,30 Angka Indeks	1.700.000.000,00	1.771.674.000,00
XVIII	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Terlaksananya pengawasan ketenagakerjaan	3,00 Paket	1.700.000.000,00	1.771.674.000,00
54	2.07.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	60,00 Perusahaan	700.000.000,00	729.513.000,00
55	2.07.06.1.01.0002	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	10,00 Kasus	300.000.000,00	312.648.000,00
56	2.07.06.1.01.0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	60,00 Perusahaan	700.000.000,00	729.513.000,00
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			2.700.000.000,00	2.820.293.000,00
	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI			2.700.000.000,00	2.820.293.000,00
G	3.32.02	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah Usulan Kawasan Transmigrasi yang direkomendasi	9,00 Kawasan Transmigrasi	900.000.000,00	931.728.000,00
XIX	3.32.02.1.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Tersedianya lahan transmigrasi yang <i>clear and clean</i>	2,00 Paket	900.000.000,00	931.728.000,00

No.	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu RKPD 2025 (Rp)	Prakiraan Maju 2026 (Rp)
			Tolak Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6	7
57	3.32.02.1.01.0001	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain	1,00 Dokumen	450.000.000,00	465.864.000,00
58	3.32.02.1.01.0002	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi	1,00 Kawasan Transmigrasi	450.000.000,00	465.864.000,00
H	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah Satuan permukiman baru atau pemenuhan daya tampung	1,00 SP	450.000.000,00	465.918.000,00
XX	3.32.03.1.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya penataan persebaran transmigran	1,00 Paket	450.000.000,00	465.918.000,00
59	3.32.03.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1,00 Laporan	450.000.000,00	465.918.000,00
I	3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah Satuan Permukiman transmigrasi dalam pembinaan	2,00 SP	1.350.000.000,00	1.422.647.000,00
XXI	3.32.04.1.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	Terlaksananya pembinaan transmigrasi	2,00 Paket	1.350.000.000,00	1.422.647.000,00
60	3.32.04.1.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang dibina	271,00 Kepala Keluarga	500.000.000,00	556.864.000,00
61	3.32.04.1.01.0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	2,00 Satuan Permukiman	850.000.000,00	865.783.000,00
		JUMLAH			36.369.178.236,00	38.294.629.785,00

BAB V

PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2025 ini dibuat sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan Ketenagakerjaan dan Ketrasmigrasian Provinsi Kalimantan Tengah jangka pendek sebagai implementasi usaha pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2025 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja ini pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur Kalimantan Tengah;
2. Penyusunan Renja ini berpedoman pada RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan;
3. Renja Disnakertrans ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Disnakertrans Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kalimantan Tengah.

Dengan disusunnya Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025.

Palangka Raya, Juli 2024

KEPALA DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,



PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI						36.369.178.236,00							38.294.629.785,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						33.669.178.236,00							35.474.336.785,00	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						33.669.178.236,00							35.474.336.785,00	
1.	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	25.194.178.236,00						-	26.567.052.785,00	
	2.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	570.000.000,00			-	Mewujudka n pemerintah yang bersih, prof essional dan responsif dalam rangka percepatan pembangun an daerah	-	-	615.397.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n pemerintah yang bersih, prof essional dan responsif dalam rangka percepatan pembangun an daerah	-		312.648.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n pemerintah yang bersih, prof essional dan responsif dalam rangka percepatan pembangun an daerah	-		40.264.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-		40.264.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-		65.897.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-		156.324.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	17.492.361.726,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	-	18.255.192.785,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				150 Orang/ Bulan	17.187.361.726,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudka n pemerintah yang bersih, prof essional dan responsif dalam rangka percepatan pembangun an daerah	-		17.911.281.785,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen	275.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n pemerintah yang bersih, prof essional dan responsif dalam rangka percepatan pembangun an daerah	-		312.648.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n pemerintah yang bersih, prof essional dan responsif dalam rangka percepatan pembangun an daerah	-		10.421.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-		10.421.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				4 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-		10.421.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	90.000.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	-	96.161.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-		15.632.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-		80.529.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	475.000.000,00			-	Mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	-	524.123.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				3 Paket	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-		260.540.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				2 Dokumen	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-		35.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				4 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-		15.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	85.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-		88.583.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			-				-	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-		75.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				4 Orang	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-		50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	985.000.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	-	1.062.310.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-		15.632.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-		104.216.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-		26.054.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-		31.264.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3000 Dokumen	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n pemerintah yang bersih, prof essional dan responsif dalam rangka percepatan pembangun an daerah	-		15.632.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n pemerintah yang bersih, prof essional dan responsif dalam rangka percepatan pembangun an daerah	-		104.216.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n pemerintah yang bersih, prof essional dan responsif dalam rangka percepatan pembangun an daerah	-		556.864.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-		208.432.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	1.335.000.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	-	1.386.489.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	570.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-		585.869.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	165.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-		175.324.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				25 Unit	600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n pemerintah yang bersih, prof essional dan responsif dalam rangka percepatan pembangun an daerah	-		625.296.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.846.816.510,00			-	Mewujudka n pemerintah yang bersih, prof essional dan responsif dalam rangka percepatan pembangun an daerah	-	-	1.920.464.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Mewujudka n pemerintah yang bersih, prof essional dan responsif dalam rangka percepatan pembangun an daerah	-		20.843.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	514.966.763,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n pemerintah yang bersih, prof essional dan responsif dalam rangka percepatan pembangun an daerah	-		536.678.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	1.311.849.747,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n pemerintah yang bersih, prof essional dan responsif dalam rangka percepatan pembangun an daerah	-		1.362.943.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	2.400.000.000,00			-	Mewujudka n pemerintah yang bersih, prof essional dan responsif dalam rangka percepatan pembangun an daerah	-	-	2.706.916.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				4 Unit	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n pemerintah yang bersih, prof essional dan responsif dalam rangka percepatan pembangun an daerah	-		156.324.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				25 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n pemerintah yang bersih, prof essional dan responsif dalam rangka percepatan pembangun an daerah	-		104.216.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				2 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-		104.216.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1.300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-		1.521.080.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	750.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-		821.080.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.	2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	-	-			-	625.000.000,00						-	643.188.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.02.1.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	-	-			-	625.000.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	-	643.188.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.02.1.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro														
			Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro				1 Dokumen	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-		362.648.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.02.1.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro														
			Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan yang mampu menyusun RTK Makro				28 Orang	275.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-		280.540.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	-	-			-	3.000.000.000,00						-	3.165.942.000,00	
	2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	-	-			-	2.750.000.000,00			-	-	-	-	2.905.402.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi														
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n				250 Orang	2.250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.384.322.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.1.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja														
			Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja				1 Unit	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		521.080.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.1.03	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	-	-			-	250.000.000,00			-	Mewujudka n peningkat an kualitas kependudu kan dan ket enagakerja an, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	-	260.540.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.1.03.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah														
			Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas				20 Perusahaan	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n peningkat an kualitas kependudu kan dan ket enagakerja an, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-		260.540.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	-	-			-	1.650.000.000,00						-	1.763.240.000,00	
	2.07.04.1.01	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.150.000.000,00			-	-	-	-	1.224.268.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja														
			Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan				1000 Orang	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		312.648.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja														
			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja				75 Orang	700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n peningkat an kualitas kependudu kan dan ket enagakerja an, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-		755.296.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.01.0006	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan														
			Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitasi layanan ULD				20 Orang	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n peningkat an kualitas kependudu kan dan ket enagakerja an, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-		156.324.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.04.1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	-	-			-	250.000.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	-	278.432.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja														
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja				100 Orang	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-		278.432.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.05	Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-			-	250.000.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	-	260.540.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.05.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah TKA yang telah Mendapatkan Pengesahan RPTKA				100 Orang	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n peningkat an kualitas kependudu kan dan ket enagakerja an, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-		260.540.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
5.	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	-	-			-	1.500.000.000,00						-	1.563.240.000,00	
	2.07.05.1.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	-	-			-	250.000.000,00			-	Mewujudka n peningkat an kualitas kependudu kan dan ket enagakerja an, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	-	260.540.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja														
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek				20 Laporan	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n peningkat an kualitas kependudu kan dan ket enagakerja an, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-		260.540.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.05.1.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-			-	750.000.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	-	781.620.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah				10 Perkara	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-		260.540.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan				10 Perkara	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-		260.540.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi				364 Asosiasi dan Serikat Pekerja	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-		260.540.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.03	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	-	-			-	500.000.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	-	521.080.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.03.0001	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)														
			Jumlah Penetapan UMP				1 Surat Keputusan	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-		260.540.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.03.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENTJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENTJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan				526.190 Orang	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-		260.540.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
6.	2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	-	-			-	1.700.000.000,00						-	1.771.674.000,00	
	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	-	-			-	1.700.000.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-	-	1.771.674.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan														
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)				60 Perusahaan	700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-		729.513.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.06.1.01.0002	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan				10 Kasus	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n peningkat an kualitas kependudu kan dan ket enagakerja an, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-		312.648.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.06.1.01.0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan														
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3				60 Perusahaan	700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n peningkat an kualitas kependudu kan dan ket enagakerja an, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah	-		729.513.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						2.700.000.000,00							2.820.293.000,00	
	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI						2.700.000.000,00							2.820.293.000,00	
1.	3.32.02	PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI	-	-			-	900.000.000,00						-	931.728.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.32.02.1.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	-	-			-	900.000.000,00			-	Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penangan masalah sosial masyarakat secara berkesinambungan	-	-	931.728.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.02.1.01.0001	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi														
			Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain				1 Dokumen	450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penangan masalah sosial masyarakat secara berkesinambungan	-		465.864.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.02.1.01.0002	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				1 Laporan	450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-ke kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial masyarakat secara berkesinambungan	-		465.918.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3.	3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	-	-			-	1.350.000.000,00						-	1.422.647.000,00	
	3.32.04.1.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	-	-			-	1.350.000.000,00			-	Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-ke kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial masyarakat secara berkesinambungan	-	-	1.422.647.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.04.1.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina				271 Kepala Keluarga	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi k elompok-ke lompok masyarakat bagi pence gahan dan peningkata n kecepatan penanggula ngan masalah sosial kema syarakat secara berk esinambun gan	-		556.864.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.04.1.01.0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman														
			Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan				2 Satuan Permukiman	850.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi k elompok-ke lompok masyarakat bagi pence gahan dan peningkata n kecepatan penanggula ngan masalah sosial kema syarakat secara berk esinambun gan	-		865.783.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	J U M L A H							36.369.178.236,00							38.294.629.785,00	